



AKTIVITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021





AKTIVITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

AKTIVITAS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021

ISBN :

No. Publikasi : 16000.2129

Katalog : 1202001.16

Ukuran Buku : 21,6 cm x 27,9 cm

Jumlah Halaman : xx + 151

Naskah : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Desain *Cover* oleh : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Penerbit : ©BPS Provinsi Sumatera Selatan

Pencetak : CV.Item Puteh Creation

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR



Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2021 pandemi covid-19 masih melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Tak hanya berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pandemi covid19 juga secara tidak langsung berdampak pada pengumpulan data sensus/survey. Pada tahun 2020, di awal pandemi pengumpulan data banyak dialihkan melalui telepon, surat elektronik maupun pengisian dokumen pendataan secara mandiri oleh responden. Namun pada tahun 2021, pendataan sudah banyak yang dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Pada bulan Juli dan Agustus 2021 pelaksanaan lapangan berbagai survey diundur dan diperpanjang karena adanya himbuan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19. Selain itu juga terdapat kegiatan lain yang harus ditunda pelaksanaannya yaitu pendataan Long form SP2020 akibat adanya penghematan anggaran yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi covid19.

Pelaksanaan kegiatan BPS tahun 2021 ini dapat dinilai berhasil. Hal ini tercermin dari berbagai pencapaian prestasi yang diraih BPS, baik dalam hal pengelolaan teknis dan pengelolaan administrasi serta pelayanan publik. Dalam hal pengelolaan teknis, BPS Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Statistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menempatkan BPS sebagai pembina. Kegiatan Pembinaan Statistik yang telah dilakukan antara lain kegiatan Coaching Clinic Rekomendasi Statistik yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2021. Dalam hal pelayanan publik, BPS Provinsi Sumatera Selatan berhasil Terbaik Kedua Pengelolaan Perpustakaan Wilayah Barat dari Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, BPS Provinsi Sumatera Selatan berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, BPS Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih Terbaik Kedua Hasil Evaluasi atas Impelementasi SAKIP BPS Provinsi Tahun 2020 -2021 dari Inspektorat BPS dan Terbaik Kedua Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun Anggaran 2020 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Prestasi lainnya di bidang administrasi yaitu BPS Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih Terbaik Pertama Penilaian Satker dengan Kepatuhan Pelaporan LHKPN Terbaik dalam Penganugerahan HSN 2021 Badan Pusat Statistik.

Meskipun demikian, keberhasilan atas pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian prestasi BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yang terangkum dalam Laporan Aktivitas BPS Tahun 2021 ini harus menjadi pendorong dan semangat untuk terus meningkatkan diri dalam hal memberikan data yang berkualitas dan beragam, memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna data, terus melakukan kolaborasi dan inovasi, serta terus berbenah dalam hal pengelolaan administrasi terutama pelaksanaan proses administrasi yang benar dan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan meringankan langkah kita bersama untuk tetap bisa menjalankan tugas dan peran kita masing-masing sebagai insan statistik serta bersama-sama membangun BPS agar menjadi kantor statistik berkelas dunia sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Palembang, Februari 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Zulkipli

DAFTAR ISI

iii KATA PENGANTAR

v DAFTAR ISI

viii IKHTISAR

viii Peristiwa Penting 2021

x Penghargaan 2021

xvii Publikasi Unggulan 2021

1 PROFIL BADAN PUSAT
STATISTIK

3 Tentang BPS dan Perangkat
Kelembagaan

4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS

7 Program Pembangunan Statistik

7 Susunan Organisasi BPS

13 BAGIAN UMUM

15 Sub Fungsi Perencanaan

15 Penyusunan Rencana Program

16 Penyusunan Anggaran

18 Monitoring dan Evaluasi

Anggaran dan Kegiatan BPS

19 Akuntabilitas Kinerja

21 Sub Fungsi Keuangan

21 Pengelolaan Perbendaharaan

24 Verifikasi Perbendaharaan

25 Penyusunan Laporan Keuangan

26 Penataan Administrasi Keuangan

28 Sub Fungsi Kepegawaian dan
Hukum

28 Kenaikan Pangkat Pilihan dan
Pangkat Reguler

29 Penyempurnaan Pemberkasan
Pegawai

33 Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian (Administrasi
Kepegawaian)

34 Pemantauan dan Penilaian
Kinerja Pegawai

36 Pengembangan Pegawai/SDM

38 Pembinaan Jabatan Fungsional
Pranata Komputer dan Statistisi

43 Sub Fungsi Umum

43 Penatausahaan BMN

44 Pelaksanaan Layanan Urusan
Rumah Tangga

47 Penyusunan Indeks Kerusakan
Bangunan Gedung Kantor
(IKBK)

47 Pelaksanaan Layanan Ekspedisi

48 Pelaksanaan Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa

49 Inovasi 2015 - 2020

50 Kendala dan Rekomendasi Tindak
Lanjut

53 FUNGSI STATISTIK SOSIAL

55 Sub Fungsi Kependudukan dan
Ketenagakerjaan

55 Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) Semesteran

56 Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) Tahunan

56 Pra Pemutakhiran Longform
Sensus Penduduk 2020 (SP 2020)

58 Metropolitan Statistical Area
(MSA) dan Mobile Positioning Data
(MPD)

59 Sub Fungsi Statistik
Kesejahteraan Rakyat

59 Survei Sosial Ekonomi Nasional

60	Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)
62	Sub Fungsi Statistik Ketahanan Sosial
62	Statistik Politik Dan Keamanan, SLHI, DAN SDLP
63	Survei Perilaku Anti Korupsi
64	Pendataan Potensi Desa
65	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
67	Inovasi 2016 - 2021
68	Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut
73	FUNGSI STATISTIK PRODUKSI
75	Sub Fungsi Statistik Pertanian
75	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
76	Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian
77	Survei Perusahaan Perkebunan
79	Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area
80	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TH
80	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP
81	Survei Perusahaan Kehutanan
82	Survei Pertanian Terintegrasi
83	Sub Fungsi Statistik Industri
83	Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan
83	Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan
85	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan
86	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

87	Sub Fungsi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi
87	Survei Pertambangan, Energi, Penggalan, Captive Power, dan Updating Direktori
88	Survei Konstruksi
90	Inovasi 2015 - 2020
91	Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut
99	FUNGSI STATISTIK DISTRIBUSI
101	Sub Fungsi Statistik Niaga dan Jasa
101	Kompilasi Data Statistik Ekspor
102	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi
104	Survei Pola Distribusi Barang Dan Jasa
104	Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan
105	Kompilasi Data Transportasi
106	Survei Perdagangan Antar Wilayah
106	Survei Karakteristik Usaha (Business Characteristics Survey)
107	Survei Bidang Jasa Pariwisata
108	Survei Wisatawan Nusantara
109	Pendataan Statistik E Commerce
110	Sub Fungsi Statistik Keuangan dan Harga Produsen
110	Survei Statistik Harga Produsen
111	Survei Harga Perdesaan
111	Statistik Lembaga Keuangan dan Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal
112	Survei Keuangan Pemerintah Daerah
113	Sub Fungsi Statistik Konsumen dan Harga Perdagangan Besar

113	Survei Harga Perdagangan Besar
114	Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras
114	Indeks Kemahalan Konstruksi
116	Inovasi 2015 - 2020
117	Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut
123	FUNGSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK
123	Sub Fungsi Diseminasi Dan Layanan Statistik
125	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar Sektoral dan Khusus
126	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
127	Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi
128	Sub Fungsi Jaringan Dan Rujukan Statistik
128	Pemutakhiran Sistem Dan Program MFD& MBS Berbasis Web
129	Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan Muatan Hasil SP2020

131	Sub Fungsi Integrasi Pengolahan Data
131	Pengolahan Data Sensus/Survei
132	Inovasi 2016 - 2021
133	Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut
135	FUNGSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK
137	Sub Fungsi Neraca Produksi
137	Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010:100
139	Sub Fungsi Neraca Pengeluaran
139	Penyusunan PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan
141	Sub Fungsi Analisis Lintas Sektor
141	Penyusunan Publikasi
142	Capacity Building Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)
144	Inovasi 2015 - 2020
145	Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut

IKHTISAR

PERISTIWA PENTING 2021

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Asisten I Pemprov Sumatera Selatan mengikuti acara Rilis Bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan BPS



Januari

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS dan Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan mengikuti rapat kunjungan kerja (reses) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut diikuti oleh 9 anggota Komisi XI DPR RI, Gubernur Sumsel, dan segenap pimpinan pusat dan provinsi dari seluruh mitra kerja Komisi XI.



Februari

Kunjungan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan ke BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Sosialisasi Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik. Selain pegawai BPS Provinsi, acara ini diikuti oleh seluruh peserta BPS Kab/Kota secara virtual melalui zoom meeting.



Maret

April



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pojok Statistik di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya yang dilaksanakan secara virtual (zoom meeting). Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama selama pandemi covid19.

Mei



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima jabatan Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan disaksikan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi BPS. Acara berlangsung di aula lantai 4 kantor BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Juni



Pencanangan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) di Kelurahan Beringin Jaya, Pagar Alam disaksikan secara langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan. Desa Cinta Statistik (Cantik) merupakan sebuah program peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Kegiatan ini merupakan salah satu QuickWins BPS.

PERISTIWA PENTING 2021

Dalam rangka merayakan hari Idul Adha 1442 H, keluarga besar BPS Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan penyembelihan hewan qurban sebanyak 3 (tiga) ekor sapi yang dibagikan kepada anggota peserta qurban, pegawai, honorer dan masyarakat sekitar kantor. Selain menunaikan perintah agama, tujuan lain dari kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar terlebih masyarakat yang kurang mampu.



Juli

BPS Provinsi Sumatera Selatan kembali menerima penghargaan dari Karwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan atas prestasinya sebagai Terbaik Kedua Pelaporan Keuangan UAPPA-W Tahun Anggaran 2020 (Kelompok A). Acara penyerahan penghargaan berlangsung secara online (zoom meeting) dan piagam penghargaan sudah diterima oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan.



Agustus

BPS Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Apel Peringatan Hari Statistik Nasional di halaman kantor yang diikuti seluruh pegawai. Apel dipimpin langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan tersebut dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Apel dihadiri dengan pelepasan balon HSN ke udara.



September

Oktober



BPS Provinsi Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada perusahaan pertambangan migas dengan kategori penilaian "Tata Waktu dan Berkas Terbaik dalam Laporan Data ke BPS". Melalui kegiatan ini diharapkan kedepannya perusahaan migas yang berada di Sumatera Selatan dapat terpacu dengan memberikan respons positif terhadap pengumpulan data pertambangan yang dilaksanakan oleh BPS.

November



Kunjungan Deputi Bidang Statistik Produksi ke Pojok Statistik di Perpustakaan Universitas Sriwijaya. Pojok Statistik merupakan media layanan statistik yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan statistik di lingkungan mahasiswa dan akademisi, sekaligus mendukung kegiatan belajar di areakampus.

Desember



Dalam upaya meningkatkan wawasan BPS Provinsi Sumatera Selatan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pencapaian WBK/WBBM dan prestasi kerja yang telah diperoleh BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan beserta tim mengunjungi kantor BPS Provinsi Jawa Tengah di Semarang.



“BPS Provinsi Sumatera Selatan terus berkarya untuk kinerja dan pelayanan data terbaik bagi pengguna data, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota”

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPS Provinsi Sumatera Selatan				
1	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun Anggaran 2020	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan	2
2	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Hasil Evaluasi atas Impelementasi SAKIP BPS Provinsi Tahun 2020 - 2021	Inspektorat BPS	2
3	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021	Badan Pusat Statistik	-
4	BPS Provinsi Sumatera Selatan	BPS Provinsi dengan Capaian Respons Survei Terbaik untuk Kategori Wilayah dengan Jumlah Usaha Lebih Dari 650 Ribu, pada Kegiatan Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi COVID-19	Badan Pusat Statistik	4
5	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Pengelolaan Perpustakaan Terbaik (Wilayah Barat)	Badan Pusat Statistik	2
6	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Pengelolaan Layanan Statistik Terbaik	Badan Pusat Statistik	Harapan 2
7	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Satker Peringkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Terbaik	Badan Pusat Statistik	-
8	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Instansi Penyedia Data Rutin dan Adhoc Terbaik	Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	-
9	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Kerjasama dalam Penyediaan Data Fiskal Regional Sumatera Selatan Tahun 2020	DJPb Kanwil Provinsi Sumatera Selatan	-

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Sinergitas dalam rangka Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan	-
Kabupaten Ogan Komering Ilir				
1	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Evaluasi Kinerja dan Anggaran BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Terbaik Pertama Tahun Anggaran 2020	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021	Badan Pusat Statistik	-
Kabupaten Lahat				
1	BPS Kabupaten Lahat	Pelaksana Kegiatan Kerangka Sampel Area (KSA) Terbaik Pertama	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
2	BPS Kabupaten Lahat	Kerjasama dalam Penyediaan Data Tanaman Pangan melalui Ubinan dan KSA	Dinas Pertanian Kabupaten Lahat	-
3	BPS Kabupaten Lahat	Kerjasama dalam Penyediaan Data Penduduk Kabupaten Lahat Melalui SP2020	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat	-
4	BPS Kabupaten Lahat	Kinerja Administrasi Terbaik di Wilayah Kerja BPS Provinsi Sumatera Selatan	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Harapan 3
5	BPS Kabupaten Lahat	Lomba Foto Mitra Statistik Terbaik ketiga	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
6	Desa Manggul Kabupaten Lahat	Partisipasi dan Peran Aktif dalam Program 100 Desa Cinta Statistik Tahun 2021	Badan Pusat Statistik	-

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Musi Rawas				
1	BPS Kabupaten Musi Rawas	BPS Kabupaten/Kota dengan Kinerja Administrasi Terbaik Ketiga di Wilayah Kerja BPS Provinsi Sumatera Selatan	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
2	BPS Kabupaten Musi Rawas	Partisipasi dalam Kegiatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Musi Rawas Utara	Sekda Kabupaten Musi Rawas Utara	-
3	BPS Kabupaten Musi Rawas	Penilaian Kecamatan Dalam Angka Terbaik Ketiga Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
4	BPS Kabupaten Musi Rawas	Terselenggaranya kegiatan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Musi Rawas	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas	-
Kabupaten Musi Banyuasin				
1	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Pelaksana Kegiatan Survei Pertambangan, Energi dan Konstruksi Terbaik Pertama Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
2	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Ketiga	KPPN Sekayu	3
3	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Statistik Sosial Award Terbaik Kedua	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
4	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Kategori Fast Response Fungsi Statistik Produksi Terbaik Pertama	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
5	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Nerwilis Award Terbaik Pertama	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
6	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	Lomba Foto Mitra Statistik Terbaik Pertama dan Kedua	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1 dan 2
Kabupaten Banyuasin				
1	BPS Kabupaten Banyuasin	Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di	Badan Pusat Statistik	-

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021		
2	BPS Kabupaten Banyuasin	Pembina Data Statistik Sektoral Bidang Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin	-
3	BPS Kabupaten Banyuasin	Dukungan Data Berkualitas untuk Mewujudkan Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	-
4	BPS Kabupaten Banyuasin	Kinerja dalam memberikan data berkualitas untuk pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin	DPRD Kabupaten Banyuasin	-
5	BPS Kabupaten Banyuasin	Pembina Data Statistik Sektoral Bidang Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin	-
6	BPS Kabupaten Banyuasin	Nerwilis Award (Kategori Terlengkap Isian Lembar Kerja)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
7	BPS Kabupaten Banyuasin	Nerwilis Award (Kategori Terbaik Kualitas Isian Kuesioner)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
8	BPS Kabupaten Banyuasin	Nerwilis Award (Kategori Tercepat Kedua)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
9	BPS Kabupaten Banyuasin	Pelaksana Kegiatan Survei Industri Terbaik Pertama Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
10	BPS Kabupaten Banyuasin	Pelaksana Kegiatan Survei Ubinan Terbaik Pertama Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
11	BPS Kabupaten Banyuasin	Pelaksana Kegiatan Terbaik Digitalisasi Titik Bangunan Hasil SP2020 Terbaik Kedua	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
12	BPS Kabupaten Banyuasin	Statistik Sosial Award Terbaik Ketiga	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
13	BPS Kabupaten Banyuasin	Kinerja Administrasi Terbaik Kedua	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Harapan 2

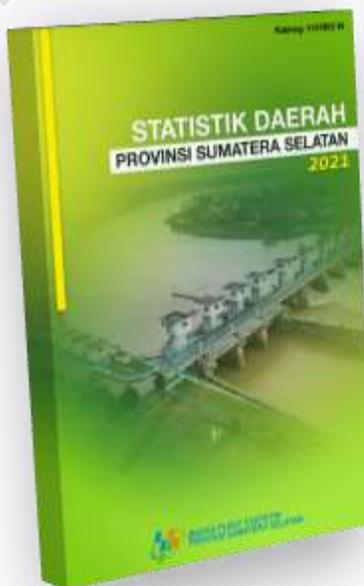
No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur				
1	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021	Badan Pusat Statistik	-
Kota Palembang				
2	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Penyedia Data Pertanian Berkualitas dan Indikator Strategis	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	-
3	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Dukungan dalam Peningkatan Kualitas Penyediaan Data dan Informasi	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	-
4	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	BPS Kabupaten/Kota dengan Kinerja Administrasi Terbaik Pertama di Wilayah Kerja BPS Provinsi Sumatera Selatan	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
5	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Mitra Kooperatif dalam Penyediaan Data Pertanian Berkualitas	Dinas Pertanian dan TPH Provinsi Sumatera Selatan	-
6	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kontribusi Konstruktif dan Kerjasama dalam Peningkatan Pelayanan melalui SKM	Polres OKU Timur	-
7	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) Terbaik Kedua	KPPN Baturaja	2
8	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Pelaksana Kegiatan Terbaik Kedua Survei Industri Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
9	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Pelaksana Kegiatan Terbaik Kedua Survei Pertanian dan Tanaman Pangan Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
Kabupaten Empat Lawang				
1	BPS Kabupaten Empat Lawang	Nerwilis Award (Terbaik Kedua Kualitas Isian Kuesioner)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
Kota Palembang				
1	BPS Kota Palembang	Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021	Badan Pusat Statistik	-
2	BPS Kota Palembang	Nerwilis Award (Terbaik Pertama Fenomena Sesuai Realita)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
3	BPS Kota Palembang	Nerwilis Award (Terbaik Kedua Isian Lembar Kerja)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2

No.	Nama Satker	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	BPS Kota Palembang	Kecamatan Dalam Angka Terbaik Kedua Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
Kota Prabumulih				
1	BPS Kota Prabumulih	Pelaksana Kegiatan Kerangka Sampel Area Terbaik Kedua Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	2
2	BPS Kota Prabumulih	Peserta Terbaik Ketiga dalam Pelaksanaan End User Training (EUT) SAKTI MODUL	KPPN Palembang	3
Kota Pagaram				
1	BPS Kota Pagar Alam	Unit Kerja dengan Manajemen dan Output Terbaik dalam Program 102 Desa Cinta Statistik Tahun 2021 (ranking 10 besar nasional)	Badan Pusat Statistik	-
2	BPS Kota Pagar Alam	Statistik Sosial Award	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Harapan 2
3	BPS Kota Pagar Alam	Kreasi Infografis Terbaik Ketiga dalam Rangka Peringatan HSN2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
Kota Lubuk Linggau				
1	BPS Kota Lubuklinggau	Statistik Distribusi Award	BPS Provinsi Sumatera Selatan	1
2	BPS Kota Lubuklinggau	Pelaksana Kegiatan Kerangka Sampel Area Terbaik Ketiga Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
3	BPS Kota Lubuklinggau	Pelaksana Kegiatan Survei Pertambangan, Energi dan Konstruksi Terbaik Ketiga Tahun 2021	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3
4	BPS Kota Lubuklinggau	Nerwilis Awards (Terbaik Fenomena Sesuai Realita)	BPS Provinsi Sumatera Selatan	3

PUBLIKASI UNGGULAN 2021



BPS Provinsi Sumatera Selatan telah merilis beberapa publikasi, baik di Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Perdagangan, maupun Bidang Pertanian dan Pertambangan



No.	Judul Publikasi	Periode Terbit	Tanggal Rilis
(1)	(2)	(3)	(4)
Februari			
1	Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2021	Tahunan	26 Februari 2021
Maret			
2	Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	19 Maret 2021
April			
3	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	Tahunan	5 April 2021
4	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran 2016-2020	Tahunan	5 April 2021
Mei			
5	Inflasi Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	7 Mei 2021
6	Nilai Tukar Petani dan Inflasi Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	7 Mei 2021
7	Statistik Harga Produsen Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	7 Mei 2021
Agustus			
8	Buku Saku Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2020	Tahunan	27 Agustus 2021
September			
9	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Agustus 2020	Tahunan	2 September 2021
10	Master File Desa Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	3 September 2021
11	Statistik Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	10 September 2021
12	Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	10 September 2021
13	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	10 September 2021
14	Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	10 September 2021
15	Statistik Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	27 September 2021

Oktober			
16	Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	4 Oktober 2021
17	Statistik Gender Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	5 Oktober 2021
18	Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	20 Oktober 2021
19	Statistik Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	29 Oktober 2021
November			
20	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	30 November 2021
21	Direktori Perusahaan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	30 November 2021
Desember			
22	Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan 2020	Tahunan	3 Desember 2021
23	Statistik Air mInum Provinsi Sumatera Selatan 2018-2020	Tahunan	15 Desember 2021
24	Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	15 Desember 2021
25	Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Selatan 2019	Tahunan	17 Desember 2021
26	Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	23 Desember 2021
27	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan 2021	Tahunan	28 Desember 2021

PROFIL BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

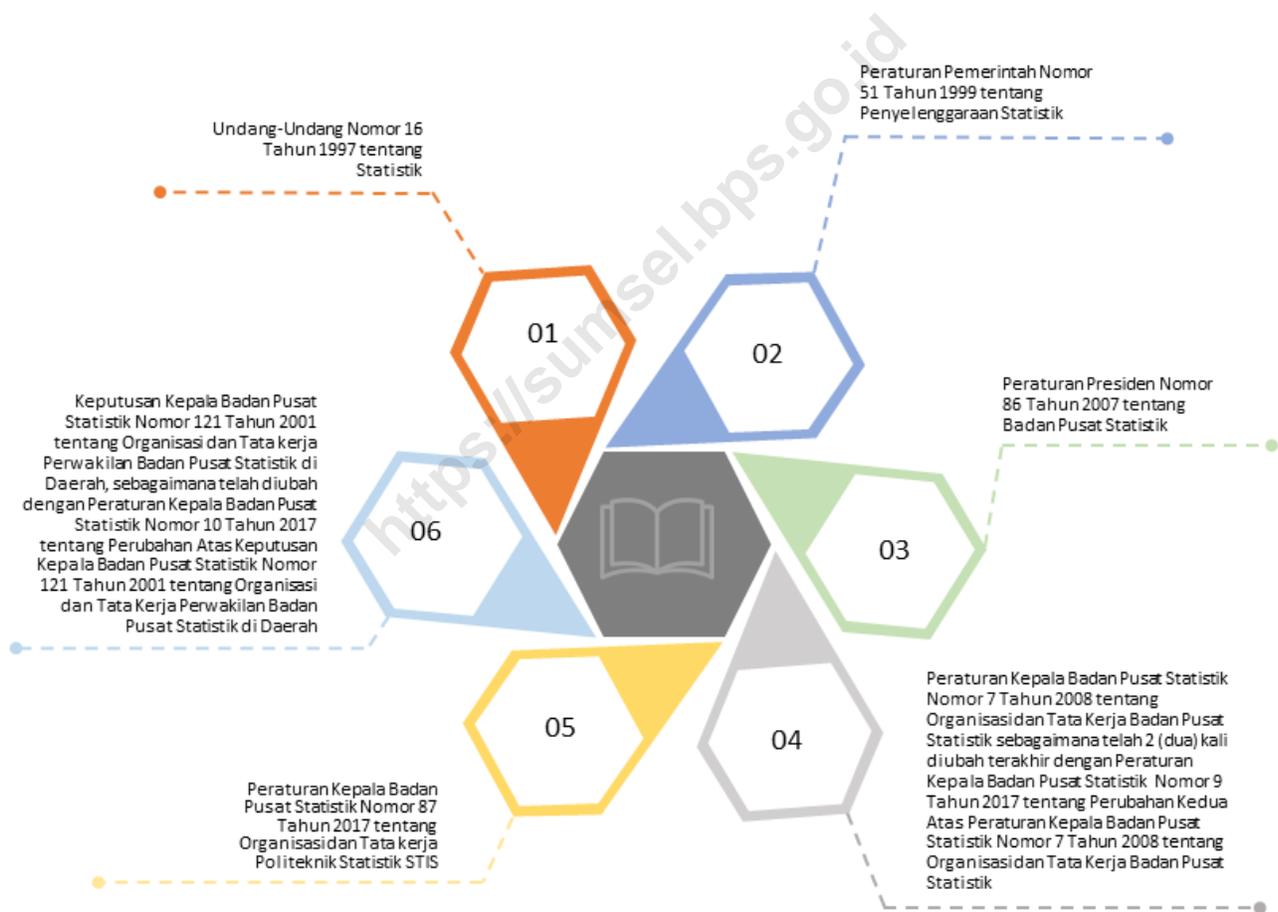


Tentang BPS dan Perangkat Kelembagaan

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah *Non* Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan statistik dengan tujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir (*up to date*), berkelanjutan, dan relevan dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional yang

handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPS telah memiliki perangkat lunak kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:



Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa statistik memegang peranan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, BPS didaulat sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi BPS sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan

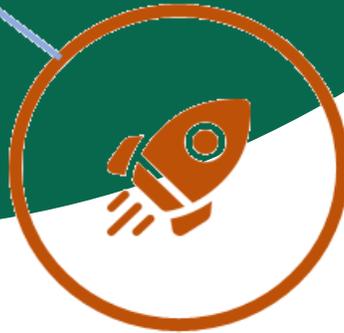
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :



Dalam rangka membangun landasan penyelenggaraan statistik yang kokoh sebagai upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator

kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif, maka BPS menetapkan visi dan misi untuk periode 2015-2019 yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 yaitu:

Pelopor Data Statistik
Terpercaya untuk Semua
(The Agent of Trustworthy
Statistical Data for All)



Misi

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional



Misi

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik



Misi

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Untuk mencapai visi dan misi BPS tersebut, BPS telah menetapkan nilai-nilai inti BPS dan kode etik statistik yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 39 Tahun 2010

A. Nilai-Nilai Inti

Nilai-nilai inti merupakan seperangkat prinsip yang menjadi sikap perilaku dan keyakinan setiap insan statistik dalam

tentang Visi, Misi, Nilai-Nilai Inti, dan Kode Etik Statistik Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

menjalankan tugas. Nilai-nilai inti BPS tersebut mencakup :



Nilai-nilai ini merupakan seperangkat prinsip yang menjadi sikap perilaku dan keyakinan setiap insan statistik dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai inti BPS tersebut mencakup

- 1 **Profesional**
Merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan tugas, terdiri dari unsur-unsur kompetensi, efektif, efisien, inovatif dan sistemik
- 2 **Integritas**
Merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan pekerjaan dan pengabdian kepada profesi dan organisasi, terdiri dari unsur-unsur dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka dan akuntabel
- 3 **Amanah**
Merupakan sikap luhur yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari unsur-unsur terpercaya, jujur, tulus, dan adil

B. Kode Etik Statistik

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta untuk memahami, menjiwai, dan melaksanakan nilai-nilai inti BPS, diperlukan kode etik statistik yang bersifat universal. Kode etik harus menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap insan statistik dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Kode etik statistik terkait dengan sifat dasar statistik yang akuntabel, terdiri atas :

1. Statistik yang independen, tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
2. Statistik yang menjamin kerahasiaan data individu;
3. Statistik yang tidak memihak dan boleh dimanfaatkan oleh semua pihak;
4. Statistik yang memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

berlaku dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik;

5. Statistik yang menjamin pemanfaatan dan interpretasi yang benar;
6. Statistik yang menjamin pemanfaatan dan interpretasi yang benar;
7. Statistik yang relevan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna data;
8. Statistik yang akurat, yang mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
9. Statistik yang tepat waktu dan terkini;
10. Statistik yang konsisten dalam dimensi ruang dan waktu;
11. Statistik yang mudah diakses dan murah;
12. Statistik yang mudah dipahami; dan

13. Statistik yang dibangun tanpa membebani responden secara berlebihan.

Program Pembangunan Statistik

Sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2007 Pasal 38, segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi pemerintah daerah, BPS di daerah dapat

menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, baik dari segi dukungan biaya maupun pelaksanaannya. Berdasarkan Renstra BPS 2020 - 2024, fungsi BPS dijalankan melalui satu program teknis dan tiga program generik, yaitu:

Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk :

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik
- b. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai dan peningkatan fungsi kehumasan
- c. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS
- d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satker BPS

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang didalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal.

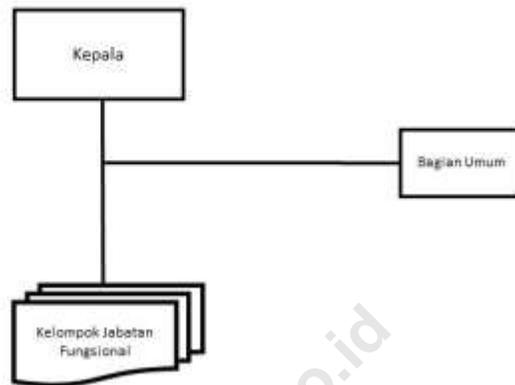
Susunan Organisasi BPS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, susunan organisasi BPS terdiri dari:

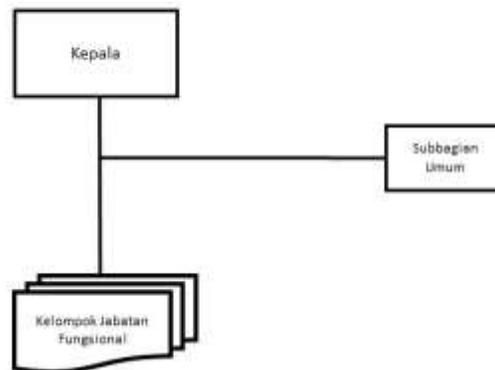
1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial;
5. Deputi Bidang Statistik Produksi;
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
8. Inspektorat Utama;
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
10. Instansi Vertikal.

Susunan organisasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten terdiri dari :

Struktur Organisasi BPS Provinsi



Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota



Pejabat Eselon II dan III serta Koordinator Fungsi BPS Provinsi Sumatera Selatan



Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan

Tempat & Tanggal Lahir
Banjarmasin, 3 Juli 1968

Latar Belakang Pendidikan

2021 S-3 Ilmu Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2002 S-2 Statistik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
1992 S-1 Pertanian, Universitas Lambung Amangkurat

Perjalanan Karir

2021 – sekarang Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
2020 – 2021 Inspektur Wilayah II Badan Pusat Statistik
2018 – 2020 Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau
2016 – 2018 Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
2013 – 2016 Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
2011 – 2013 Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

Ir. Suparindiyah
Kepala Bagian Umum

Tempat & Tanggal Lahir
Kendal, 7 Desember 1966



Latar Belakang Pendidikan

1992 S-1 Pertanian, Universitas Gajah Mada

Perjalanan Karir

2017 - Sekarang Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
2016 - 2017 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir
2008 - 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Muara Enim
2005 - 2008 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau



Drs. Timbul P Silitonga, M.Si
Koordinator Fungsi Statistik Sosial

Tempat & Tanggal Lahir
Simalungun, 16 September 1965

Latar Belakang Pendidikan

2009 S-2 Planning Studies, Universitas Bengkulu
1990 S-1 Matematika

Perjalanan Karir

2016 - Sekarang Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
2011 - 2016 Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu
2007 - 2011 Kepala Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Irwanto, S.Si, MM

Koordinator Fungsi Statistik Produksi

Tempat & Tanggal Lahir
Jakarta, 27 Desember 1970



Latar Belakang Pendidikan

2008 S-2 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA
1999 S-1 Statistik, Universitas Terbuka
1992 D-III Statistik, Akademi Ilmu Statistik

Perjalanan Karir

2020 - 2021 Koordinator Fungsi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
2017 - 2020 Kepala Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Sukerik, SST., M.Si
Koordinator Fungsi Statistik
Distribusi

Tempat & Tanggal Lahir
Musi Banyuasin, 20 Agustus 1975

Latar Belakang Pendidikan

2008 S-2 Ekonomi, Universitas Sriwijaya
2001 D-IV Statistik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
2000 D-III Statistik, Akademi Ilmu Statistik

Perjalanan Karir

2019 - Sekarang Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
2016 - 2019 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim
2014 - 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin
2012 - 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat
2010 - 2012 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang

Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Koordinator Fungsi Neraca Wilayah
dan Analisis Statistik (NWAS)

Tempat & Tanggal Lahir

Jakarta, 30 Juni 1967



Latar Belakang Pendidikan

2009 S-2 Manajemen, Universitas Tridianti
1996 S-1 Statistik, Institut Pertanian Bogor
1989 D-III Statistik, Akademi Ilmu Statistik

Perjalanan Karir

2017 - Sekarang Koordinator Fungsi NWAS Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Drs. Agusman Simbolon, MAB
Koordinator Fungsi Integrasi
Pengolahan dan Diseminasi Statistik
(IPDS)

Tempat & Tanggal Lahir
Tarutung, 8 Agustus 1965

Latar Belakang Pendidikan

2012 S-2 Manajemen Ekonomi Publik, LAN Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
1990 S-1 Matematika, Universitas Sumatera Utara

Perjalanan Karir

2019 - 2021 Koordinator Fungsi IPDS Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
2013 - 2019 Kepala Bidang IPDS Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

<https://sumsel.bps.go.id/>

BAGIAN UMUM



Sub Fungsi Perencanaan

Penyusunan Rencana Program

A. Pengumpulan Data SHBJ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan perlu adanya standar biaya baik bersifat umum maupun khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Badan Pusat Statistik melakukan pengumpulan data Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) untuk memenuhi kebutuhan data harga yang memadai guna menunjang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan sebagai pedoman serta ancar-ancar harga khususnya bagi pengguna barang dan jasa pada Satuan Kerja.

B. Penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 disusun untuk menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit organisasi di lingkungan BPS baik di pusat maupun daerah; menjamin keterkaitan dan

Selain melakukan pencacahan untuk barang yang digunakan oleh masing-masing satker BPS, tahun 2021 BPS diminta bantuan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Sistem Penganggaran untuk melaksanakan pencacahan untuk beberapa item yang ada dalam SBM. Pencacahan ini dimaksudkan untuk mengupdate harga satuan yang telah disediakan dalam SBM yang dilaksanakan di 34 provinsi, yang terdiri dari SSB (Survei Standar Biaya) 13 komponen barang.

Output kegiatan ini adalah Publikasi Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun 2021.

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan BPS; dan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan di BPS dalam kurun waktu 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) presiden terpilih kemudian disesuaikan dengan dokumen RPJM Nasional melalui proses pembahasan lebih mendalam dengan

seluruh unit kerja dan pihak terkait, dan selanjutnya diterbitkan Peraturan Kepala BPS sebagai dasar penetapan sehingga menghasilkan Renstra BPS 2020-2024.

Output kegiatan ini adalah Publikasi Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024.

Penyusunan Anggaran

A. Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program

Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran merupakan komponen input yang dibangun untuk mengintegrasikan aktivitas di lingkungan Perencanaan sehingga adanya sinergi manajemen mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi, karena masing-masing merupakan rangkaian proses yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam rangka mewujudkan

pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; memperoleh rencana kerja BPS pada tahap penyelesaian alokasi anggaran tahun n+1 dengan menggunakan aplikasi; dan memperoleh rencana kerja BPS serta petunjuk operasional kegiatan (POK) BPS pada tahun berjalan serta hasil dari revisi anggaran. Output kegiatan ini adalah POK tahun berjalan.

B. Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program

Pagu anggaran BPS Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan akhir tahun anggaran. Perubahan terutama disebabkan karena adanya *refocusing* dan *realokasi* anggaran kegiatan survei dan sensus untuk penanganan covid19. Selain itu juga karena adanya realokasi belanja paket meeting kegiatan pelatihan ke belanja modal pada program penyediaan dan

pelayanan informasi statistik, hal ini dikarenakan sejak pandemi melanda kegiatan pelatihan semuanya dilakukan secara online. Perubahan pagu beberapa satker BPS di wilayah Sumatera Selatan juga disebabkan karena adanya revisi anggaran antar satker dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pada program Dukungan Manajemen (belanja pegawai) dengan tetap menjaga total pagu wilayah.

C. Penyusunan RKA BPS Tahun 2022

Tahun 2021 dilakukan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BPS Tahun 2022. Penyusunan RKA Tahun 2022 terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Penyusunan Pagu Anggaran Indikatif dilaksanakan bulan Januari - April 2021;

2. Penyusunan Pagu Anggaran dilaksanakan bulan Mei - Juli 2021;
3. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2021.

D. Penyusunan RKAKL BPS

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga mengamanatkan setiap Kementerian Lembaga untuk menyusun RKA-KL dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja.

Sesuai dengan PMK No 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2021 dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan

RKAKL 2022 guna penyesuaian dengan perkembangan dalam bidang pengelolaan anggaran. Penyusunan RKAKL BPS-RI melibatkan BPS pusat dan daerah untuk melakukan pembahasan dan evaluasi anggaran BPS secara menyeluruh. Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2022 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Setiap Satker menuangkan seluruh informasi yang berkaitan dengan informasi kinerja, informasi belanja dan informasi pendapatan dalam formulir Kertas Kerja RKA-KL untuk kemudian dilakukan entri data.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen RKA-KL dan DIPA BPS TA 2022.

Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Kegiatan BPS

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan

dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Beragam aktivitas monitoring evaluasi yang dilakukan tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan internal yaitu menyusun Laporan monitoring anggaran dan kegiatan BPS tahun 2021 dengan periode bulanan yang mencakup monitoring penyerapan anggaran dan monitoring progres pengadaan barang dan jasa khususnya belanja modal.

Selain menyusun laporan yang bersifat internal tersebut, aktivitas monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan eksternal yaitu mencakup pelaporan monitoring dan evaluasi pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) dan pelaporan e-Monev Bappenas.

Akuntabilitas Kinerja

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Output kegiatan terkait SAKIP antara lain Laporan Kinerja BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Dokumen Penetapan

Kinerja BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2021, Laporan Capaian Kinerja Triwulan I
Tahun 2020, Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021.

<https://sumsel.bps.go.id>

Sub Fungsi Keuangan

Pengelolaan Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mengelola anggaran Badan Pusat Statistik yang bersumber dari DIPA Anggaran 54. Dana dalam DIPA bersumber dari anggaran Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN). Keluaran yang dihasilkan berupa dokumen pertanggungjawaban pengeluaran uang dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Utama semesteran dan tahunan. Dokumen pertanggungjawaban pengeluaran uang

berupa tanda bukti belanja bahan, kuitansi atau daftar pembayaran honor/upah, tanda bukti dan kuitansi pembayaran perjalanan dinas, tanda bukti atau kuitansi belanja operasional untuk mendukung kegiatan BPS, lengkap dengan berkas pengadaannya. Seluruh dokumen pertanggungjawaban tersebut disimpan secara tertib dalam ruang arsip keuangan. Realiasi anggaran Satker BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, yaitu:

Realiasi Anggaran Tahun 2021

Kode Program	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)		
054.01.WA	DUKMAN	15.631.079.000	15.498.645.930	99,15
054.01.GG	PPIS	6.151.540.000	6.071.970.218	98,71
Jumlah		21.782.619.000	21.570.616.148	99,03

A. Pengelolaan SP2D

Anggaran BPS Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami beberapa kali revisi sampai dengan akhir tahun anggaran. Revisi (perubahan)

terutama disebabkan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran kegiatan survei dan sensus untuk penanganan covid19.

Output akhir pengelolaan SPJ di di Bendahara adalah berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP menjadi masukan bagi Bagian Verifikasi untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM diotorisasi oleh KPPN menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D menjadi dasar bagi Bendahara untuk melakukan

pembayaran kewajiban negara kepada pihak lain.

Pada tahun 2021, terjadi kenaikan jumlah SP2D yang terbit dibandingkan tahun 2020. Banyaknya SP2D pada tahun 2021 yaitu 830 atau naik sebesar 28,68 persen dari tahun 2020. Jumlah dan nilai SP2D per triwulanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah dan Nilai SP2D Menurut Triwulanan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

No	Triwulan	2020		2021		Perubahan (%)	
		SP2D	Nilai (Rp)	SP2D	Nilai (Rp)	SP2D	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	I	95	4.589.358.051	45	3.556.472.390	(52,63)	(22,51)
2	II	62	3.833.839.745	147	4.734.835.580	137,10	23,50
3	III	98	3.994.391.499	142	5.956.297.935	44,90	49,12
4	IV	390	6.223.690.934	496	7.323.010.243	27,18	17,66
Jumlah		645	18.641.280.229	830	21.570.616.148	28,68	15,71

B. Pengelolaan Surat Perjalanan Dinas

Tahun anggaran 2021, BPS Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dengan nilai belanja keseluruhan dalam satu tahun sebesar 1.757.022.320 atau turun sebesar 18,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja perjalanan menurun akibat penyesuaian tata kelola pendataan lapangan dan pelatihan petugas survei yang dilakukan secara online atau wawancara melalui telepon sejak pandemi covid19 melanda. Sebagian besar anggaran perjalanan dinas di

refocusing untuk belanja penanganan covid19. Secara rinci per jenis akun

belanja perjalanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase Perubahan Belanja Perjalanan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

No	Jenis Akun	Uraian	Total Realisasi Belanja (Rp)		Perubahan (%)
			TA 2020	TA 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.166.318.247	1.757.022.320	(18,89)
1	524111	Perjalanan Biasa	1.053.430.747	1.203.834.220	14,28
2	524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	329.550.000	28.270.000	(91,42)
3	524114	Paket Meeting Dalam Kota	774.296.500	514.363.000	(33,57)
4	524119	Paket Meeting Luar Kota	9.041.000	10.555.100	16,75

C. Rekonsiliasi Data SAIBA

Rekonsiliasi data SAIBA adalah kegiatan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Anggaran Pendapatan Negara

dan Hibah, serta Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah.

Proses rekonsiliasi adalah berupa membandingkan ADK dalam SAIBA BPS Provinsi Sumatera Selatan dengan ADK dalam SPAN KPPN.

No	Uraian	SiAP (Rp)	SAI (Rp)	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pagu Belanja	21.782.619.000	21.782.619.000	-
2	Belanja	21.593.562.988	21.593.562.988	-
3	Pengembalian Belanja	(22.946.840)	(22.946.840)	-
4	Estimasi Pendapatan	-	-	-
5	Pendapatan Bukan Pajak	39.083.792	39.083.792	-
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-	-	-

7	Pengembalian Pajak	-	-	-
8	Mutasi Uang Persediaan	-	-	-
9	Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
10	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	-	-
11	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	-	-	-

D. Pengelolaan Permohonan Register dan Pengesahan Kerja Sama Hibah Uang, Barang/ Jasa

Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 17 Juli 2017, tentang Administrasi Pengelolaan Hibah setiap satuan kerja pemerintah yang menerima pendapatan dan belanja dari hibah yang berasal dari instansi lain baik dalam dan luar negeri berupa uang/barang/jasa, wajib melakukan register atas hibah yang diterimnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak berlakunya PMK tersebut semua hibah yang berasal dari pemberi hibah

dalam negeri yang diterima oleh Satker untuk permohonan nomor register dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang membawahi satker tersebut.

Selama tahun anggaran 2021, tidak ada satker BPS Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang menerima hibah.

Verifikasi Perbendaharaan

Dalam rangka meminimalisasi kesalahan dalam proses administrasi sebelum pengeluaran anggaran diajukan ke KPPN, perlu dilakukan pemeriksaan bukti pendukung pengeluaran anggaran yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melalui mekanisme Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM). Koordinasi dan kerjasama antar satuan kerja, Panitia Pelelangan/Pejabat Pengadaan, Subject matter, Perbendaharaan dan Verifikasi sangat dibutuhkan sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian pencairan anggaran.

Kegiatan verifikasi secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tahap, yaitu monitoring anggaran dan verifikasi anggaran. Pada tahap monitoring anggaran dilakukan pengecekan kesesuaian kode akun pada SPP dengan DIPA/POK, dan ketersediaan pagu anggaran serta kesesuaian uraian kegiatan dalam DIPA/POK. Melalui proses monitoring anggaran, pada setiap bulan dilakukan pelaporan realisasi penggunaan anggaran sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi

dokumen SPP, dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi keuangan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan banyaknya dokumen SPM yang terbit dan dokumen SP2D yang diterbitkan kurun waktu 2020-2021.

Tabel Banyaknya SPM Terbit dan SP2D diterbitkan, 2020 - 2021

No	Uraian	Tahun	
		2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SPM terbit	650	838
2	SP2D terbit	645	830
3	SPM batal	5	8

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja (Satker), wilayah, eselon I sampai tingkat Kementerian/Lembaga. Untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan Keuangan BPS semesteran dan tahunan,

sehingga konsistensi data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, Eselon I hingga sampai tingkat Kementerian/Lembaga akan terpelihara dan dapat mempertahankan opini WTP. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu agar terwujud tertib administrasi di bidang pelaporan keuangan di tingkat wilayah dan tingkat satker-satker dibawahnya, sehingga tercipta administrasi dibidang pelaporan

keuangan BPS yang lengkap, akurat dan konsisten serta sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Rekonsiliasi Data Laporan keuangan BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 dilaksanakan secara online (zoom meeting) selama 2 hari efektif pada tanggal 19 -20

Januari 2021. Peserta adalah Kasubbag Umum, Operator SAIBA dan SIMAK BMN dari BPS Kabupaten/Kota sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dan staf di Bagian Umum BPS Provinsi sebanyak 5 (lima) orang. Output kegiatan ini adalah data laporan keuangan semester I, triwulan III dan tahunan.

Penataan Administrasi Keuangan

Kegiatan penatausahaan administrasi keuangan meliputi pengelolaan administrasi belanja pegawai, pengelolaan administrasi

biaya pindah pegawai karena mutasi dan pensiun, dan penataan arsip keuangan.

A. Pengelolaan administrasi belanja pegawai

Dalam aktivitas pengelolaan administrasi belanja pegawai, komponen yang diperlukan antara lain menerima Surat Keputusan mutasi pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian, update data ke dalam aplikasi GPP, finalisasi penyusunan daftar pembayaran gaji, rekonsiliasi penggunaan dan sisa dana, pengelolaan Tunjangan Kinerja Pegawai (TKP) dengan memperhatikan komponen nilai grade, presensi, hukuman disiplin dan CKP sedangkan uang makan komponennya adalah presensi.

Keluaran dari aktivitas kegiatan tersebut diatas adalah Daftar Gaji Induk (12 bulan,

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan ke 13), Daftar Kekurangan Gaji /rapel, kekurangan Tunjangan Struktural dan Tunjangan Fungsional, gaji susulan, gaji terusan, Daftar Tunjangan Kinerja dan Daftar Uang Makan, Daftar Realisasi Belanja Pegawai (12 bulan), Daftar Monitoring Pembayaran Hutang Pegawai Melalui Pemotongan Gaji (12 bulan), Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pegawai pindah/pensiun (12 bulan), Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja (12 bulan dan TK bulan ke 13) dan Daftar Pembayaran uang makan (12 bulan).

B. Penataan arsip keuangan

Demi terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik diperlukan penataan arsip keuangan yang handal. Dengan penataan arsip keuangan yang baik dan rapi, maka dukungan pasokan dokumen untuk auditor dapat teratasi. Bendahara dapat mencari arsip keuangan yang telah didokumentasikan dalam ruang khusus dengan mudah walaupun kegiatan tersebut telah selesai selama beberapa waktu sebelumnya. Dengan penataan arsip keuangan yang handal, satuan kerja dapat dengan mudah mengetahui masa simpan dokumen sehingga secara berkala dapat melakukan penilaian kembali dan penghapusan arsip keuangan yang sudah tidak diperlukan lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kegiatan penataan arsip keuangan di BPS Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan sejak bulan Juni 2019. Di tahap awal kegiatan penataan arsip keuangan di pandu oleh petugas arsip dari ANRI dan melibatkan pejabat arsiparis serta 3 (tiga) orang tenaga mitra yang di kontrak selama 1 (satu) bulan untuk membantu penataan arsip keuangan.

Kegiatan penataan arsip keuangan di BPS Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik berkat upaya oleh Tim Arsiparis BPS Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 4 orang. Tim terdiri dari 2 orang Arsiparis Ahli Muda dan 2 orang Arsiparis Ahli Pertama.

Sub Fungsi Kepegawaian dan Hukum

Kenaikan Pangkat Pilihan dan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi kerja dan pengabdianya. Serta sebagai dorongan kepada PNS untuk dapat meningkatkan produktifitasnya.

Dasar Hukum terkait proses kenaikan pangkat masih menggunakan peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor: D.26-30/79.V/99 tertanggal 14 Juli 2017 perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa untuk kenaikan pangkat reguler BKN menerapkan pelayanan kenaikan pangkat otomatis (KPO).

i. KPO adalah kenaikan pangkat otomatis yang sebelumnya sebutannya adalah KP reguler

ii. KPO dapat diberikan kepada pegawai apabila :

1. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir,
2. setiap unsur PPK sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
 - » KPO diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural ataupun fungsional tertentu, tidak sedang tugas belajar atau bukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
 - » KPO didasarkan dari Nominasi KPO bagi PNS yang belum mencapai pangkat puncak (sesuai pendidikan yang dimiliki yang tercantum pada data base BKN (SAPK)

Sedangkan Kenaikan pangkat pilihan antara lain diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- i. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- ii. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- iii. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- iv. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- v. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- vi. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- vii. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- viii. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, tidak melalui pelayanan KPO.

- A. Kenaikan Pangkat (KP) periode April 2021
 KP periode April 2021, yang diusulkan ke BKN sebanyak 32 orang dan yang mendapat persetujuan teknis BKN sebanyak 32 orang (100 persen).
- B. Kenaikan Pangkat (KP) Periode Oktober 2021
 KP periode Oktober 2021, yang diusulkan ke BKN sebanyak 19 orang dan yang mendapat persetujuan teknis BKN sebanyak 19 orang (100 persen).

Tabel Usulan Kenaikan Pangkat April dan Oktober 2021

Periode KP	Jumlah Pegawai yang Diusulkan (orang)	Jumlah Pegawai yang Mendapat Persetujuan		Jumlah Pegawai yang Tidak Mendapat Persetujuan	
		Orang	%	Orang	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
April 2021	32	32	100	-	-
Oktober 2021	19	19	100	-	-

Penyempurnaan Pemberkasan Pegawai

A. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Di dalam undang undang telah di tetapkan bahwa hak ASN selain mendapat Gaji dan Fasilitas lainnya, ASN juga mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala setiap dua tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan

yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan

setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali.

B. Pengangkatan CPNS dan PNS

i. Pengangkatan CPNS

Saat ini dasar hukum pengangkatan CPNS dan PNS adalah berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tanggal 27 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pada saat pemberkasan untuk penetapan NIP harus melampirkan "surat pernyataan" dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan untuk yang

bersangkutan (SPRP) dalam hal ini telah disampaikan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian.

Penugasan/Penempatan:

» Calon PNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

» Calon PNS melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Masa Percobaan:

» Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

» Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.

- ii. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus pendidikan dan pelatihan;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS;
 - d. Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS;
 - e. Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.
- iii. Pengelolaan Mutasi Pindah Pegawai
 - Ketentuan tentang Mutasi pegawai diatur dalam Pasal 190 sampai dengan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
 - 1. Mutasi terdiri atas:
 - » mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah;
 - » mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - » mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi;
 - » mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya;
 - » mutasi PNS antar-instansi; dan
 - » mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
 - 2. Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - 3. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
 - 4. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
 - 5. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
 - 6. Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - » memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;

» tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

» tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan

» tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

iv. Penyesuaian Pendidikan/Pencantuman Gelar

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada modal finansial yang besar, peralatan yang berteknologi tinggi, maupun fasilitas yang lengkap, tetapi perlu mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang baik dan profesional pula. Langkah BPS dalam meningkatkan profesionalitas dan pengembangan SDMnya salah satunya adalah melalui peningkatan pendidikan secara formal dengan memberikan kesempatan kepada para pegawainya untuk mendapatkan tugas belajar maupun ijin belajar. Sebagai bentuk pengembangan pegawai, BPS mengirimkan kandidat pegawai terbaik untuk mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi baik di dalam dan luar negeri.

Kelanjutan hasil dari peningkatan pendidikan yang diperoleh oleh para pegawai tersebut adalah pentingnya pencantuman gelar sebagaimana diatur dalam Perka BPS Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPS pasal 14 dijelaskan bahwa "untuk penggunaan penambahan gelar dan pencantuman gelar akademik secara kedinasan oleh pegawai yang memperoleh ijazah baik melalui tugas belajar atau ijin belajar ditetapkan dengan keputusan Kepala BPS setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

v. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Penetapan pemberhentian Calon PNS dan PNS sebagaimana di atur dalam pasal 290 PP 11 Tahun 2011 Tahun 2017 merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan

manajemen ASN di instansi pemerintah. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, dan kesekretariatan Lembaga non struktural dalam hal ini merupakan kewenangan Kepala BPS.

Untuk pemberhentian dengan hak pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan teknis

dari Kepala BKN. Pemberhentian pegawai pada tahun 2021 antara lain:

No	Jenis Pemberhentian	Jumlah (orang/SK)
(1)	(2)	(3)
1	Pemberhentian sesuai Batas Usia Pensiun (BUP)	8
2	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (APS)	-
3	Pemberhentian/Pensiun Janda/Duda PNS	1
4	Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/rohani/uzur	-
5	Pemberhentian karena tewas dalam tugas	-

Pengelolaan Dokumen Kepegawaian (Administrasi Kepegawaian)

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan terhadap PNS, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan tertib pemeliharaan tata naskah kepegawaian pegawai Badan Pusat Statistik. Hal ini dilakukan agar dokumen tata naskah kepegawaian pegawai Badan Pusat Statistik yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun *image document* dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi baik pusat maupun daerah, serta pelayanan informasi kepegawaian yang efisien dan efektif. Agar tata naskah

kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik ataupun dalam bentuk *image document* dapat terpelihara dengan baik.

Output dari kegiatan ini adalah dapat memberikan informasi mengenai perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari yang bersangkutan. Selain melakukan pengelolaan dokumen pegawai pada tahun 2020 Sub Bagian Kepegawaian telah memproses Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami yang diusulkan dan telah selesai proses dari BKN seperti pada tabel dibawah ini:

Jenis Pembuatan	Kartu Pegawai	Kartu Istri	Kartu Suami
(1)	(2)	(3)	(4)
Baru	9	2	7
Penggantian Kartu	-	-	-

Pemantauan dan Penilaian

Kinerja Pegawai

Maksud dan tujuan kegiatan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu sebagai wujud kepedulian terhadap pegawai, meningkatkan motivasi semangat pegawai dalam berkompetisi, bersaing sehat dalam bekerja, sekaligus mampu memberikan kinerja optimal bagi organisasi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait pemantauan dan penilaian kinerja pegawai yaitu:

- A. Pemilihan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi
 Tujuan Pemilihan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi (KSKP) untuk lebih meningkatkan motivasi dan Kinerja Koordinator Statistik Kecamatan baik yang menyangkut semangat kerja, prestasi kerja maupun mutu hasilnya. Pemilihan KSK Berprestasi dilakukan secara bertingkat dari tingkat kabupaten

ke tingkat provinsi dan pada tahun ini semuanya dilakukan secara online.

Pemilihan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi (KSKP) seyogyanya dilaksanakan setiap tahun. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, prosesi Pengukuhan KSKP tahun ini dilaksanakan secara virtual karena dampak pandemi covid19. Para KSKP tidak di undang langsung ke Jakarta dan menghadiri acara peringatan Kemerdekaan RI di istana negara seperti biasanya. Prosesi pengukuhan KSKP hanya dilaksanakan secara serentak di masing-masing kantor BPS Provinsi dan KSKP menerima medali serta piagam pengukuhan dari jajaran pimpinan BPS Provinsi. Pengukuhan KSKP bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan agar

bisa dimaknai bahwa KSK adalah pahlawan data bagi BPS.

B. Pengelolaan Disiplin dan Penghargaan Pegawai

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap negara khususnya terhadap organisasi BPS.

1. Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Tujuan Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai yang sudah mencapai masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, baik yang menyangkut semangat kerja, prestasi kerja maupun mutu hasil kerjanya, serta dapat memberi teladan kepada aparatur yang lain untuk lebih memacu semangat mencapai prestasi kerja.

Jenis Penghargaan (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)
Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	43	17	38
Satyalencana Karya Satya 20 Tahun	-	-	1
Satyalencana Karya Satya 30 Tahun	2	3	3
Total	45	20	42

2. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai

Pelanggaran Disiplin untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) BPS dilaksanakan berpedoman pada PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

3. Pengelolaan Presensi PNS

Pengelolaan Presensi PNS meliputi kegiatan entry memo ketidakhadiran pegawai dan penerbitan rekap absensi.

4. Pengelolaan Cuti

Rekapitulasi pengelolaan cuti pegawai BPS pada tahun 2021:

Jenis Cuti	Jumlah
(1)	(2)
1. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)	-
2. Cuti Besar	-
3. Cuti Tahunan	132
4. Cuti Bersalin	16
5. Cuti Karena Alasan Penting	6
6. Cuti Sakit	3

5. Pembuatan Ikhtisar dan Dokumentasi PPK (DP3)

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur SKP dan perilaku kerja. PPK PNS BPS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir

Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur:

- a. SKP bobotnya 60 %
- b. Perilaku kerja bobotnya 40 %

Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan & berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai. Adapun rekapitulasi PPK PNS BPS adalah sebagai berikut:

Jenis Jabatan	Jumlah
(1)	(2)
1. Eselon II	1
2. Eselon III	16
3. Eselon IV	15
4. Fungsional	287
5. Staf	123
Jumlah	442

Pengembangan Pegawai/SDM

BPS menyadari peranan sumber daya manusia sebagai faktor penentu utama mampu tidaknya Organisasi untuk bersaing secara dinamis. Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu Sumber Daya Manusianya (SDM). Penanganan SDM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka sistem pengelolaan SDM yang bersifat strategis, integrated,

interrelated dan unity. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan bisnis proses yang dibangun. Oleh karenanya, salah satu agenda Reformasi Birokrasi BPS yang terpenting adalah Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Penataan sistem manajemen SDM aparatur difokuskan pada nilai strategis fungsi SDM sebagai pelaksana dari setiap bisnis proses yang berjalan di BPS. Penataan ini meliputi pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas serta menjunjung asas profesional, integritas dan amanah. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Sejalan dengan era reformasi birokrasi, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional, bermoral dan bertanggungjawab adalah melalui pembinaan secara berkesinambungan untuk membentuk sikap, perilaku dan karakter pegawai yang

selanjutnya mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Untuk memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur, dan kompeten telah diselenggarakan Ujian DInas/Penyesuaian Ijazah bagi ASN yang naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi Pelaksanaan Ujian DInas dan Penyesuaian Ijazah Tahun 2021 telah dilakukan secara online, yaitu melalui sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan dari aplikasi yang telah ada yaitu Claroline. Sistem ujian online merupakan proses ujian yang dilaksanakan melalui media internet/jaringan komputer menggunakan komputer (dan sejenisnya) serta terhubung dengan server ujian dan dilaksanakan serentak pada hari yang sama. Dengan menggunakan sistem ujian secara online, diharapkan kerahasiaan soal lebih terjamin, menghemat penggunaan anggaran untuk pencetakan soal dan lembar jawaban, mempercepat proses pemeriksaan dan laporan, penilaian dilakukan secara objektif, dan juga dapat mengurangi jumlah pengawas.

Secara garis besar, alur kerja kegiatan Ujian DInas dan Penyesuaian Ijazah tahun 2021 dimulai dari input berkas pendaftaran yang diterima oleh Bagian Kesejahteraan dan

Pengembangan Pegawai yang kemudian akan di entry oleh petugas yang berwenang ke database yang telah dipersiapkan.

Kemudian, setelah diumumkan nama peserta yang telah memenuhi persyaratan, dilakukan kegiatan tutorial atau pemberian kisi-kisi ujian di BPS Pusat dan Provinsi masing-masing. Setelahnya, dilaksanakan kegiatan utama yaitu pelaksanaan ujian di BPS Pusat dan BPS Provinsi masing-masing. Hasil ujian akan dirapatkan oleh Panitia dan akan diumumkan kepada peserta melalui Unit Kerja Eselon II masing-masing peserta.

Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 99 ayat (2), disebutkan bahwa Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional (JF) yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan. BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi dituntut untuk selalu melakukan pembinaan Pranata Komputer dan Statistisi baik di lingkungan BPS maupun luar BPS. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Ujian Penyesuaian Ijazah DIII/S1 meliputi 6 mata ujian yaitu statistika, pengetahuan umum, Pancasila, kemampuan kuantitatif, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia serta penulisan kertas kerja perorangan (KKP). Dari sebanyak 1 orang yang mengikuti Ujian PI DIII/S1 dan dinyatakan lulus.

Ujian Dinas meliputi 10 mata ujian yaitu Pancasila, UUD 1945, propenas, kepegawaian, KORPRI, bahasa Indonesia, sejarah, pengetahuan perkantoran, organisasi BPS dan substantif. Dari sebanyak 2 orang yang mengikuti Ujian Dinas dan semuanya dinyatakan lulus.

Reformasi Birokrasi selalu memantau kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan perannya, Instansi Pembina memiliki tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi JF; b. menyusun standar kompetensi JF; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF; f. menyusun kurikulum pelatihan JF; g.

menyelenggarakan pelatihan JF; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi JF; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; l. mengembangkan sistem informasi JF; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diselenggarakan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan untuk menyebarluaskan jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi.

A. Pembinaan Jabatan Fungsional Statistisi
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan BPS Provinsi Sumatera Selatan terkait

pembinaan jabatan fungsional statistisi pada tahun 2021 yaitu:

i. Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Statistisi

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2013, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme, Statistisi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, harus lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang yang akan didudukinya, pada tahun 2021 telah diselenggarakan Uji Kompetensi Statistisi. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua gelombang, yaitu pada Juni dan Oktober 2021. Pelaksanaan uji kompetensi secara online dan serentak di BPS Pusat dan beberapa BPS Provinsi.

Persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi Statistisi antara lain telah memiliki angka kredit minimal, sebagai berikut:

1. Statistisi Terampil/Pelaksana, angka kredit minimal 90
2. Statistisi Mahir/Pelaksana Lanjutan, angka kredit minimal 125
3. Statistisi Ahli Pertama/Pertama, angka kredit minimal 175
4. Statistisi Ahli Muda/Muda, angka kredit minimal 350

5. Statistisi Ahli Madya/Madya, angka kredit minimal 775

Jumlah peserta dan kelulusan untuk masing-masing jenjang jabatan dan tahap dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Statistisi Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Ujian Tahun 2021

Jabatan	Jenis Ujian	Tahap I			Tahap II		
		Peserta	Lulus	%	Peserta	Lulus	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Statistisi Terampil	Statistisi Mahir	2	2	100.00	1	1	100.00
Statistisi Ahli Pertama	Statistisi Ahli Muda	3	3	100.00	3	3	100.00
Statistisi Ahli Muda	Statistisi Ahli Madya	1	1	100.00	1	1	100.00
		6	5	100.00	5	5	100.00

Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pindah Jabatan Statistisi Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Ujian Tahun 2021

Jabatan	Jenis Ujian	Tahap I			Tahap II		
		Peserta	Lulus	%	Peserta	Lulus	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Fungsional Umum	Statistisi	4	3	75.00	-	-	-
Pranata Komputer	Statistisi	2	2	100.00	-	-	-
Statistisi Ahli Muda	Statistisi Ahli Madya	-	-	-	1	1	100.00
		6	5	100.00	1	1	100.00

ii. Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
Jabatan Fungsional Statistisi

Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi serta untuk memenuhi

kebutuhan jabatan fungsional, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Tertentu khususnya Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer melalui jalur penyesuaian/*inpassing*. ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* harus mengikuti dan

lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional Statistisi di BPS Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2021. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan secara online dan serentak di BPS Pusat dan Daerah.

Jumlah peserta dan kelulusan untuk masing-masing jenjang jabatan dan tahap dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Peserta Uji Kompetensi *Inpassing* Statistisi Menurut Jenjang Jabatan Tahun 2021

Jabatan	Peserta	Lulus	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Statistisi Mahir	1	1	100.00
Statistisi Ahli Pertama	-	-	-
Statistisi Ahli Muda	4	4	100.00
Statistisi Ahli Madya	-	-	-
Jumlah	5	5	100.00

Output yang dihasilkan dari pembinaan Jabatan Fungsional Statistisi melalui pelaksanaan uji kompetensi adalah untuk mendapatkan Pejabat Fungsional

Statistisi yang memiliki kesesuaian antara jabatan yang didudukinya dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Kegiatan yang sudah dilakukan BPS Provinsi Sumatera Selatan terkait

pembinaan jabatan fungsional pranata komputer pada tahun 2021 yaitu:

i. Uji Kompetensi untuk Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, pada Tahun 2020 BPS mengadakan uji kompetensi bagi ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing serta bagi fungsional Pranata Komputer yang akan naik jabatan. Jadwal ujian

kompetensi dilaksanakan berbarengan dengan uji kompetensi jabatan fungsional statistisi yaitu pada bulan Juni dan Oktober 2021. Pelaksanaan uji kompetensi juga dilaksanakan secara online dan serentak di BPS Pusat dan Daerah. Jumlah peserta dan kelulusan untuk masing-masing jenjang jabatan dan tahap dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Statistisi Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Ujian Tahun 2021

Jabatan (1)	Jenis Ujian (2)	Tahap I			Tahap II		
		Peserta (3)	Lulus (4)	% (5)	Peserta (7)	Lulus (8)	% (9)
Pranata Komputer Terampil	Pranata Komputer Mahir	-	-	-	1	0	0.00
Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Ahli Muda	2	0	0.00	1	0	0.00
Pranata Komputer Ahli Muda	Pranata Komputer Ahli Madya	1	0	0.00	1	0	0.00
Jumlah		3	0	0.00	3	0	0.00

Output yang dihasilkan dari pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui pelaksanaan uji kompetensi adalah untuk mendapatkan Pejabat

Fungsional Pranata Komputer yang memiliki kesesuaian antara jabatan yang didudukinya dengan kompetensi yang dimilikinya.

Sub Fungsi Umum

Penatausahaan BMN

Kegiatan monitoring, pembinaan, dan pelaporan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN seluruh Satker di lingkungan Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini meliputi inventarisasi (tertib administrasi dokumen sumber BMN), penatausahaan (mulai penerimaan BMN, penyimpanan barang persediaan, dan pendistribusian BMN) dan penghapusan BMN yang sudah tidak layak digunakan karena rusak atau kadaluarsa. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dan dituangkan dalam laporan BMN Semester I, II, dan tahunan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)-Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. SIMAK-BMN dilaksanakan di seluruh Satker BPS, meliputi

kegiatan monitoring, pembinaan, dan pelaporan data SIMAK-BMN semester I, II, dan Tahunan dengan melakukan kunjungan pengawasan dan pengendalian (wasdal) ke daerah maupun evaluasi di pusat. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk kegiatan Rekonsiliasi data BMN yang dilaksanakan dalam 7 tahap : 1. Rekonsiliasi data internal SAK dengan SIMAK-BMN di seluruh Satker BPS; 2. Rekonsiliasi data BMN di tingkat Satker kab/kota dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 3. Penggabungan data di tingkat Provinsi; 4. Rekonsiliasi data BMN di tingkat Satker provinsi dengan Kanwil DJKN; 5. Penggabungan data di tingkat Instansi; 6. Rekonsiliasi data BMN di tingkat Instansi dengan DJKN; 7. Penyusunan Laporan BMN semester I, II, dan Tahunan.

Kegiatan lain yang dilakukan di tahun 2021 yaitu pelaksanaan Sensus BMN. Sensus BMN adalah kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali terhadap BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan melalui opname fisik

setiap tahun. Pendataan Sensus BMN menjadi tanggungjawab Sub Koordinator Fungsi (SKF) Umum khususnya operator SIMAK BMN. Adapun output dari Sensus BMN Tahun 2021 yaitu : 1. Rekapitulasi Hasil Sensus BMN (RHS); 2. Daftar Barang Hasil Sensus BMN (DBHS) Barang Baik; 3. Daftar Barang Hasil Sensus BMN Kondisi Rusak Ringan; 4. Daftar Barang Hasil Sensus BMN Kondisi Rusak Berat; 5. Daftar Barang Hasil Sensus BMN Kondisi Berlebih; 6. Daftar Barang Hasil Sensus BMN Tidak Ditemukan; 7. Daftar Barang Hasil Sensus BMN Sengketa; 8. Berita Acara Hasil Sensus BMN; 9. Surat Penetapan Hasil Sensus BMN; 10. Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN; 11. Catatan atas Pelaksanaan Sensus BMN.

Kendala yang dihadapi dalam sensus BMN antara lain operator BMN harus

menginventaris semua barang, melakukan pengecekan serta pencatatan status/kondisinya saat ini. Semua barang yang tercatat dalam SIMAK BMN harus dicari tahu keberadaannya dan dilakukan pengecekan untuk ditetapkan statusnya. Tentunya itu bukanlah pekerjaan yang mudah jika ingin pekerjaan terselesaikan tepat waktu. Mencari keberadaan barang yang hilang tidak bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang mudah terlebih jika satker baru saja melakukan revitalisasi kantor. Dibalik semua kesulitan tersebut, Sensus BMN memiliki manfaat yang sangat berarti bagi penetapan predikat WTP BPS. Data BMN yang teridentifikasi dan ter-update sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan tentunya akan berpengaruh signifikan pada peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan penetapan predikat WTP oleh BPK.

Pelaksanaan Layanan Urusan

Rumah Tangga

Penyusunan laporan kegiatan Bagian Rumah Tangga dimaksudkan untuk dapat mengkoordinasikan secara baik mengenai realisasi kegiatan tahun berjalan dan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini

adalah terwujudnya laporan kegiatan dan perencanaan kegiatan yang baik.

- A. Penataan Sarana dan Prasarana Fisik
Penataan sarana dan prasarana fisik di BPS Tahun 2021 diimplementasikan dalam upaya melakukan peningkatan kenyamanan kantor sebagai tempat

terselenggaranya aktivitas kerja dan pelayanan publik. Sub Koordinator Fungsi Umum telah melakukan beberapa kegiatan terkait penataan sarana prasarana yaitu :

1. Untuk sarana dan prasarana di ruang-ruang rapat BPS, Sub Koordinator Fungsi Umum telah memenuhi permintaan pimpinan untuk melengkapi semua ruang-ruang rapat dengan akrilik infografis (poster) indikator-indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS dalam rangka promosi data statistik. Penggunaan infografis/poster merupakan media sosialisasi yang cukup efektif karena memadukan unsur-unsur visual dan grafis untuk dapat menarik perhatian, mengkomunikasikan pesan secara singkat dan membuat data statistik menjadi tidak membosankan
2. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi para pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Sub Koordinator Fungsi Umum telah memenuhi permintaan pimpinan untuk mengubah basement parkir menjadi ruang diskusi/rapat/pertemuan yang sifatnya santai (tidak terlalu formal)

seperti ruang rapat pada umumnya. Space ini kedepannya bisa digunakan pegawai untuk melakukan berbagai aktivitas seperti diskusi/sharing, pelaksanaan acara kantor semi/non formal, kegiatan olahraga/seni, dll. Agar ruangan tersebut terlihat lebih segar dan nyaman maka dilakukan pembenahan dan pemberian beberapa design interior yang sesuai berupa lukisan dinding. Selain itu juga diadakan kursi, meja dan sound system untuk melengkapi sarana dan prasarana di ruang basement.

3. Mengadakan meja strapping untuk mempermudah proses pengepakan dan pengiriman barang yang dilakukan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengadakan troli barang untuk mempermudah proses pengangkutan barang/konsumsi acara.
5. Mengadakan web camera untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan rapat secara online (zoom meeting).
6. Mengadakan roller blind untuk berbagai ruang perkantoran.
7. Mengadakan pot berdiri dalam rangka mempercantik dan

menambah keasrian lingkungan kantor.

8. Mengadakan meja lipat untuk pelaksanaan acara-acara kantor. Meja lipat dipilih karena efisien ketika dibawa dan dipindahkan.
9. Mengadakan proyektor/viewer sebanyak 2 unit untuk mengganti viewer ruang vicon dan lantai 4 yang usianya sudah cukup tua dan kabel penghubungnya tidak kompatibel dengan laptop/pc saat ini karena masih menggunakan port VGA.
10. Untuk meningkatkan kenyamanan kerja pegawai, SKF Umum melakukan pengadaan AC sebanyak 7 unit yang diperuntukkan untuk ruangan rapat dan beberapa ruang kerja pegawai.
11. Dalam rangka peningkatan layanan terhadap konsumen data dalam hal ini pengunjung Pojok Statistik, Bagian Umum mengadakan berbagai peralatan pelengkap Pojok Statistik seperti kursi, meja, dll.
12. Untuk meningkatkan kinerja anggota tim humas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 juga dilakukan pengadaan peralatan fotografi, tas drone, handycam dan baterai kamera.

- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fisik
- Biaya pengelolaan sarana dan prasarana fisik berupa pemeliharaan dan perawatan gedung di BPS meliputi pemeliharaan bangunan gedung kantor dan halaman kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2, dan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

Beberapa pengadaan dan pekerjaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik telah diselesaikan, termasuk pemeliharaan kebersihan, perapihan dan penerangan lingkungan kantor, lingkungan kerja, perawatan lift, ac dan perangkat lain di ruang-ruang rapat, baik yang dilakukan sendiri atau mengawasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk mengurangi resiko penyebaran covid19, SKF Umum juga telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala.

Untuk pemeliharaan rutin (service berkala) seluruh kendaraan dinas operasional jabatan dan kendaraan dinas operasional kantor yang terdiri dari berbagai merk kendaraan, SKF Umum

melakukan kerjasama dengan bengkel yang biasa merawat kendaraan dinas dari K/L lain.

Penyusunan Indeks Kerusakan Bangunan Gedung Kantor (IKBK)

Dengan tersedianya data indeks kerusakan bangunan, maka akan diperoleh acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan gedung kantor dan rumah dinas secara obyektif dengan menggunakan suatu panduan standar. Dengan demikian sasaran pembangunan sarana dan prasarana fisik akan tercapai secara lebih tepat.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk menyempurnakan panduan standar

penghitungan indeks kerusakan gedung kantor dan rumah dinas BPS Kabupaten/Kota; melakukan updating inventarisasi dan identifikasi kerusakan gedung kantor dan rumah dinas; dan melengkapi data penghitungan indeks kerusakan gedung kantor dan rumah dinas.

Output kegiatan ini adalah angka indeks kerusakan gedung dari seluruh satker/provinsi.

Pelaksanaan Layanan Ekspedisi

Kegiatan layanan ekspedisi yang dilaksanakan SKF Umum antara lain melaksanakan pengiriman surat, dokumen, publikasi dan barang ke BPS kabupaten/kota,

juga ke instansi lain. Output layanan ini adalah terlaksananya pengiriman surat, dokumen dan barang.

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan Jasa merupakan kegiatan pendukung seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan di Badan Pusat Statistik. Sejak tahun 2018, BPS telah menggunakan peraturan pengadaan barang dan jasa yang, yaitu Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.

Sejak pandemi covid19 kegiatan pelatihan tatap muka ditiadakan sehingga aktivitas pengadaan paket meeting dan perlengkapan

peserta pelatihan juga tidak dilaksanakan. Anggaran paket meeting sebagian besar direalokasi dan dihemat untuk penanganan covid19. Pada tahun 2021, BPS Provinsi Sumatera Selatan banyak melakukan pembelanjaan barang modal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran serta kehumasan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa selain belanja modal peralatan dan mesin antara lain pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan publikasi, buku pedoman, kuesioner, leaflet dan hasil cetakan lainnya.

INOVASI 2016 - 2021

- MUSI merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menunjang kegiatan manajemen Sumber Daya Manusia. Melalui aplikasi ini pemantauan kinerja pegawai mulai hingga level terendah dapat dilakukan. Berbagai fitur aplikasi ini antara lain penilaian CKP online, laporan kegiatan per hari pegawai (log book), laporan WFH, CKP pegawai yang terintegrasi dengan IKI. Disamping fitur terkait penilaian kinerja pegawai, aplikasi MUSI juga memiliki fitur kalender rapat/pertemuan, kalender DL, barang persediaan serta penomoran surat menyurat. Pada tahun 2021 ada pengembangan aplikasi fitur kalender DL.

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

<https://sumsel.bps.go.id>

KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
PENGUMPULAN DATA SHBJ	Inkonsistensinya penamaan item barang dan satuan ukuran.	Diperlukan kamus barang dengan konsep penamaan yang seragam. Maka perlu dilakukan konsolidasi dalam penyeragaman database.
KETERPADUAN PENYUSUNAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI PROGRAM	<i>Subject matter</i> sering melakukan perubahan kegiatan sehingga harus melakukan revisi anggaran.	Perlunya perencanaan dari <i>subject matter</i> yang lebih tepat dan akurat.
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	Pemahaman satker khususnya satker daerah terhadap pengisian pelaporan terkait monitoring dan evaluasi masih berbeda-beda.	Perlu adanya refreshing secara menyeluruh (seluruh satker daerah) secara kontinyu/bertahap. Mengingat seringkali adanya pergantian orang yang menangani pelaporan monev di daerah. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan pembinaan administrasi terpadu yang meliputi pembinaan saki, keuangan, kearsipan, kepegawaian dan pengadaan barang/jasa.

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI	Pelaporan monev masih dilakukan manual melalui excel, beberapa formula/rumus penghitungan terkadang ada yang tidak jalan sehingga terjadi kesalahan penghitungan capaian kinerja.	Diharapkan ada pengembangan sistem pelaporan kinerja yang berbasis website untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat pelaporan.
VERIFIKASI PERBENDAHARAAN	Rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga pencairan dana cenderung menumpuk pada triwulan IV.	Langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan anggaran dipatuhi oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan anggaran akan lebih berkualitas lagi, dan di SKF Keuangan pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering terjadi pergantian penyusun laporan keuangan di daerah; 2. Kurangnya sosialisasi bagi penyusun laporan keuangan di daerah sehingga pemahaman mereka kurang untuk memberikan penjelasan yang memadai dalam LK dan bahkan terkadang salah menuliskan informasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan pembinaan penyusunan LK secara rutin dan kontinu dengan menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan BPS Pusat maupun pihak eksternal seperti DJPB. Acara pembinaan LK bisa disisipkan di kegiatan Rekonsiliasi SAI di awal tahun. 2. Diusahakan agar kebijakan/peraturan/update

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	3. Kebijakan/peraturan/update aplikasi datang di akhir waktu.	bisa disosialisasikan lebih awal, jangan terlalu dekat dengan batas akhir penyampaian LK
PENATAUSAHAAN BMN	Masih terdapat asset yang belum termanfaatkan (idle) yaitu sebidang tanah hibah dari KPKNL. Sampai saat ini sertifikat tanah belum balik nama karena terkendala proses pengukuran tanah di BPN.	Meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN agar proses pengukuran bisa segera dilakukan.
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR	1. Bocor pada dinding ACP lantai 4	1. Perbaiki dan ganti ACP yang bocor
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR	1. Jarak outdoor AC terlalu jauh indoor (lebih dari 20 meter), idealnya jarak minimal outdoor dengan indoor adalah 5 meter, sehingga menyebabkan sering rusaknya outdoor AC	1. Harus menyiapkan anggaran ekstra untuk pemeliharaan AC setiap tahunnya, atau solusi lainnya adalah dengan memindahkan outdoor AC sedekat mungkin dengan indoor

FUNGSI STATISTIK SOSIAL



Sub Fungsi Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei- survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya serta perkembangannya di tingkat provinsi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Sakernas Semesteran adalah Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi yang rilis pada bulan Mei 2021 (hasil Sakernas Februari 2021) dan Laporan Pelaksanaan Sakernas Februari dan Agustus 2021



Monitoring Kualitas Sakernas di Kabupaten OKU



Monitoring Kualitas Sakernas di Kabupaten Musi Banyuasin

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan

Pelatihan Instruktur Nasional dan Instruktur Daerah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan dilakukan secara online melalui elearning.bps.go.id dengan pertemuan melalui Zoom Meeting. Sedangkan untuk pelatihan petugas lapangan sebagian besar dilakukan secara online melalui zoom meeting dan elearning (hanya Kab. Ogan Komering Ilir dan Kab. Musi Rawas Utara yang melaksanakan pelatihan petugas secara tatap muka).

Indikator yang dihasilkan dari Sakernas Agustus 2021 seperti TPT dan TPAK dinantikan oleh pemerintah daerah dalam rangka evaluasi kegiatan yang telah mereka laksanakan seperti Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, data ketenagakerjaan lainnya juga banyak digunakan pemerintah untuk menganalisis perekonomian di daerahnya.

Pra Pemutakhiran Longform Sensus Penduduk 2020 (SP 2020)

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus ketujuh sejak Indonesia merdeka. SP2020 diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi amanat Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, namun sejalan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Sakernas Tahunan adalah untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan dan untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Sakernas Tahunan adalah Publikasi Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan 2020, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan 2020 serta Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi yang rilis pada bulan November 2021 (hasil Sakernas Agustus 2021).

dengan resolusi PBB pada program Sensus Penduduk dan Perumahan dunia tahun 2020 yang diadopsi oleh *Economic and Social Council* (ECOSOC) pada tahun 2015. Resolusi ini untuk memastikan negara-negara anggota

PBB melaksanakan sensus pada periode 2015-2024.

Berbeda dengan enam sensus penduduk sebelumnya, pada SP2020 pencacahan lapangan akan menggunakan data dasar dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara ini SP2020 dapat menghasilkan data dasar kependudukan yang sangat strategis dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia. Selain itu, untuk pertama kalinya pengumpulan data pada sensus penduduk dilakukan melalui beberapa moda pencacahan. Pertama, pengisian kuesioner secara online (Sensus Penduduk Online) melalui website atau disebut dengan metoda CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*). Kedua, pengisian kuesioner melalui wawancara oleh petugas menggunakan kuesioner elektronik atau CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) dan kuesioner kertas atau PAPI (*Paper and Pencil Interviewing*).

Kegiatan SP2020 bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan yang

sangat strategis dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia. SP2020 akan dilaksanakan mengacu pada proses bisnis yang terdiri dari 7 tahapan. Dalam setiap tahapan harus dilakukan dengan baik agar menghasilkan data penduduk yang baik juga.

Namun dalam perjalanannya, terdapat perubahan jadwal dan penyesuaian proses bisnis dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di seluruh wilayah Indonesia akibat pandemi covid19. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pendataan short form dan dilanjutkan long form pada tahun 2021. Sayangnya, kegiatan Long form SP2020 ini harus ditunda dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemic Covid-19. Namun, mengingat pentingnya data yang akan dihasilkan, maka kegiatan long form SP2020 ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2022. Output dari kegiatan Pra Pemutakhiran Longform Sensus Penduduk 2020 adalah Laporan Pra Pemutakhiran Longform Sensus Penduduk 2020.



Metropolitan Statistical Area (MSA) dan Mobile Positioning Data (MPD)

Mobilitas penduduk merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kondisi demografi di suatu wilayah. Akhir-akhir ini, seseorang lebih cenderung untuk melakukan mobilitas penduduk secara non permanen (tidak menetap) dibandingkan dengan tinggal menetap, terutama di wilayah perkotaan. Fakta tersebut menjadikan data mobilitas penduduk non permanen semakin dibutuhkan. Data mobilitas penduduk non permanen ini dapat berasal dari beberapa sumber, salah satunya adalah survei komuter, namun ketersediaan statistik komuter memiliki keterbatasan dalam beberapa hal sehingga mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengeksplorasi pemanfaatan sumber data lain yaitu Mobile Positioning Data (MPD).

MPD dapat digunakan untuk penentuan Metropolitan Statistical Area (MSA), dimana data tersebut digunakan untuk mengestimasi deliniasi kawasan metropolitan. Kegiatan MSA MPD pada tahun 2021 dilaksanakan di dua

wilayah metropolitan, yaitu wilayah metropolitan Patungraya Agung di Sumatera Selatan dan wilayah metropolitan Banjarbakula di Kalimantan Selatan.

Wilayah Metropolitan (WM) Patungraya Agung di Sumatera Selatan sebagai salah wilayah metropolitan yang dilaksakan kegiatan MSA di tahun 2021 terdiri dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

Penerapan PPKM pada pertengahan tahun 2021 mengakibatkan kegiatan MSA MPD 2021 di WM Patungraya Agung mengalami perubahan jadwal dari yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan setelah status PPKM Level 4 di Sumatera Selatan dicabut.

Output dari kegiatan Metropolitan Statistical Area (MSA) dan Mobile Positioning Data (MPD) adalah Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA) dan Mobile Positioning Data (MPD) Tahun 2021.

Sub Fungsi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan sandaran utama pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan nasional agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan tujuan pembangunan internasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs).

Secara nasional pelaksanaan Susenas Maret 2021 mencakup 75.000 rumah tangga (selanjutnya rumah tangga disingkat ruta) sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan mencakup 2450 rumah tangga yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota. Statistik yang dihasilkan dari Susenas 2021 antara lain adalah statistik/indikator kesejahteraan rakyat, pola konsumsi masyarakat, dan pengeluaran rumah tangga.

Sejak pemerintah mengumumkan adanya kasus positif Virus COVID-19 pada bulan Maret 2020, perkembangan/penyebaran virus COVID-19 terus meluas. Disisi lain pemerintah masih membutuhkan data/informasi/indikator utama dari sosial ekonomi masyarakat untuk melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu pengumpulan data Susenas Maret 2021 harus tetap dilaksanakan, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Susenas Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021 adalah Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan 2021 dan Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021.



Supervisi Pencacahan Susenas di Kabupaten PALI

Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)

Pelaksanaan Susenas September 2020 merupakan pencacahan Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Secara nasional pelaksanaan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021 mencakup 75.000 rumah tangga (selanjutnya rumah tangga disingkat ruta) sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Sumatera Selatan mencakup 2450 rumah tangga yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota.

Jenis data yang dikumpulkan dalam Daftar VSEN21.MSBP mencakup keterangan demografi; keterangan Nomor Induk Kependudukan; keterangan kepemilikan sandang, frekuensi makan, dan fasilitas tidur; keterangan kesehatan dan rekreasi; keterangan akses media; keterangan untuk balita; keterangan kebersamaan; keterangan gangguan fungsional; keterangan olahraga; keterangan kebudayaan dan kepemilikan tabungan; partisipasi sekolah; aktivitas sekolah dan biaya pendidikan; keterangan hubungan sosial kemasyarakatan; keterangan ketenagakerjaan; keterangan sosial budaya rumah tangga; keterangan

perumahan; keterangan perlindungan sosial; dan keterangan penghasilan rumah tangga.

Data yang dikumpulkan dari pengeluaran konsumsi mencakup keterangan tentang kuantitas dan nilai konsumsi/pengeluaran makanan, untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir, keterangan rekapitulasi pengeluaran, serta keterangan tentang pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi selama setahun terakhir.

Pelatihan petugas pencacah dan pengawas diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan secara online maupun offline. Pelatihan petugas pencacah dan pengawas diselenggarakan selama 4 (empat) hari efektif dengan dua gelombang, gelombang 1(satu) tanggal 1-10 September 2021 dan gelombang 2(dua) tanggal 8 - 16 September 2021. Sebelum memasuki pelatihan peserta online diberikan tugas untuk melakukan pembelajaran mandiri E-Learning yang telah disiapkan selama beberapa hari. Pada saat pelaksanaan pelatihan petugas, perlu memastikan kesiapan peserta/petugas untuk

implementasinya seperti melakukan role playing daring. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan pelaksanaan Susenas September 2021 mencapai hasil yang optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) September 2021 adalah Laporan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) September Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.

<https://sumsel.bps.go.id>

Sub Fungsi Statistik Ketahanan Sosial

Statistik Politik dan Keamanan, SLHI, DAN SDLP

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan (Statistik Polkam) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan di bidang sosial yang tepat sasaran. Melalui pengumpulan data Statistik Polkam, pemerintah dapat memperoleh gambaran tentang tingkat kriminalitas, jumlah organisasi masyarakat, dan data lainnya terkait situasi politik dan keamanan yang ada di masyarakat secara umum. Data-data tersebut tentunya dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam masyarakat.

Kegiatan pengumpulan data SLHI dan SDLP merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data terkait kondisi lingkungan hidup, baik tanah, air dan udara serta iklim di level provinsi. Selain itu, kegiatan SLHI dan SDLP juga mengumpulkan informasi terkait kondisi perairan/laut seperti panjang garis pantai, kondisi terumbu karang dan padang lamun, dan sebagainya. Selain itu melalui pengumpulan data SLHI dan SDLP, pemerintah juga dapat mengetahui

bagaimana pengelolaan dan pengolahan sampah di daerah, ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan, serta data-data strategis lainnya. Data-data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mengarah kepada pembangunan berbasis lingkungan yang mendukung program nasional dan internasional. Data SLHI dan SDLP juga menunjang informasi terkait eksplorasi data SDG's.

Pengumpulan data SLHI dan SDLP setiap tahunnya dilaksanakan oleh BPS provinsi, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan oleh BPS Republik Indonesia. Kegiatan pengumpulan data Statistik Polkam, SLHI dan SDLP tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan beberapa instansi/lembaga yang ada di level provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi, Polda Sumatera

Selatan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Politik dan Keamanan, SDLP, dan SLHI ini adalah

Survei Perilaku Anti Korupsi

Dalam rangka untuk upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik(BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei Perilaku Anti

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 serta Laporan Statistik Polkam, SLHI, dan SDLP Tahun 2021.

korupsi mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan tentang anti korupsi. Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauhmana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan pendidikan dan budaya anti korupsi.

Output dari Survei Perilaku Anti Korupsi ini adalah Laporan Statistik Perilaku Anti Korupsi 2021.



Pendataan Potensi Desa

Dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi statistik berbasis kewilayahan. Berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini pendataan Podes menjadi satu-satunya basis data kewilayahan dengan konten dan cakupan yang paling lengkap. Data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data Podes dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data Podes digunakan untuk identifikasi tipologi wilayah misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-nonpesisir, tertinggal-nontertinggal, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan jaman, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk dapat dipenuhi.

Tujuan Pendataan Podes 2021 secara umum adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan kewilayahan, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Adapun tujuan khusus Podes 2021 adalah:

1. Menyediakan data yang dapat mendukung perencanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023.
2. Sebagai sarana untuk updating Master File Desa (MFD).
3. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi : sosial, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah.
4. Menyediakan data bagi keperluan updating klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-non pesisir, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik.
6. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*).
7. Menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis.
8. Menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa

Output dari pelaksanaan pendataan Lapangan PODES 2021 adalah Laporan Pendataan Potensi Desa 2021.



Supervisi Pendataan PODES di Kabupaten OKU



Pendataan PODES di rumah perangkat desa

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Konsep memajukan kesejahteraan umum, merupakan konsep yang menggambarkan sebuah proses pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menggambarkan perkembangan sosial masyarakat (progress of society). Konsep kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan oleh para pendiri negara Indonesia, tampaknya tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material (welfare, being-well atau prosperity), tetapi juga mengarah kepada konsep kebahagiaan (happiness).

Kebahagiaan memiliki makna dan cakupan yang tidak hanya terbatas pada kondisi kehidupan yang menyenangkan (pleasant life) dan kondisi kehidupan yang baik (being-well atau good life), tetapi juga pada kondisi kehidupan yang bermakna (meaningful life). Dalam konteks ini, konsep kebahagiaan menjadi topik pembangunan nasional yang mendapat perhatian lebih besar dibandingkan dengan konsep kesejahteraan material maupun kemakmuran ekonomi.

Subjektif well-being mencakup tiga dimensi yaitu (1) kepuasan hidup (life satisfaction); (2) perasaan (afeksi); dan (3) makna hidup (eudaimonia). SPTK 2021 telah mencakup variabel-variabel yang mencakup ketiga dimensi tersebut. Sejak SPTK 2017, domain kesehatan sudah dilengkapi dengan ukuran kesehatan mental yang mencakup variabel terkait tingkat kesepian (loneliness) dan tekanan psikis. Selain itu, juga terdapat berbagai indikator kehidupan sosial yang dapat digunakan untuk mengukur Indikator Modal Sosial. Pada SPTK 2021 terdapat penambahan variabel terkait kriminalitas dan perilaku peduli lingkungan hidup.

Secara umum, SPTK 2021 bertujuan untuk mendapatkan informasi rinci tentang tingkat

kebahagiaan yang diukur dengan berbagai variabel objektif dan subjektif yang relevan. Sementara itu, tujuan khususnya adalah:

1. Menyediakan data untuk menghitung Indeks Kebahagiaan 2021.
2. Menyediakan data untuk Indikator Modal Sosial 2021.
3. Menyediakan data untuk menghitung Indeks Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (IPPLH) 2021.
4. Menyediakan data untuk menghitung indikator terkait kriminalitas.

Output dari pelaksanaan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021 adalah Laporan Statistik Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021.



INOVASI 2016 - 2021

- Susenas Web-Android Monitoring System (SWAMI) dibangun guna memudahkan monitoring pelaksanaan lapangan Susenas. Proses pengawasan tersebut dapat dilakukan secara real time, dikarenakan menggunakan basis android dan terhubung dengan database dalam web. Dalam pengoperasiannya menggabungkan basis operasi Web (online) dan Aplikasi Android SWAMI.

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

- SIM RAPOR (Sistem Monitoring Informasi Rapor) bertujuan untuk menghasilkan database mitra BPS, memonitor progress pengelolaan kegiatan sensus dan survei, serta mengevaluasi dan memberikan skoring nilai atas kinerja petugas lapangan. SIM RAPOR dimanfaatkan untuk mengidentifikasi mitra andalan BPS yang bisa dikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan BPS terutama untuk kegiatan besar seperti Sensus Penduduk Tahun 2020.

SENSUS DAN SURVEI BPS

- Kegiatan Sensus Penduduk 2020 sudah dimulai sejak tahun 2019 khususnya dalam rangkaian sosialisasi SP2020. Untuk memudahkan pendokumentasian kegiatan sosialisasi, maka Bidang Statistik Sosial berinisiatif untuk membuat bulletin. Buletin ini merupakan kumpulan kegiatan SP2020 baik kegiatan yang dilakukan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Buletin Sputar Sumsel sudah terbit dalam 8 edisi.

SOSIALISASI SENSUS PENDUDUK 2020

KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN	Responden tidak bisa ditemui karena sedang bepergian; Banyak responden yang menolak didata karena sedang dalam kondisi pandemi covid19	Petugas melapor ke BPS Kabupaten/kota dan meminta responden menandatangani berati acara non respon untuk yang menolak
SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN	Responden tidak bisa ditemui karena sedang bepergian; Banyak responden yang menolak didata karena sedang dalam kondisi pandemi covid19	Petugas melapor ke BPS Kabupaten/kota dan meminta responden menandatangani berati acara non respon untuk yang menolak
PRA PEMUTAKHIRAN LONGFORM SENSUS PENDUDUK 2020 (SP 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Web Coolsis susah di akses. 2. Waktu alokasi yang terlalu singkat dikarenakan belum jelasnya anggaran dan jumlah petugas lapangan dari BPS pusat. 3. Database BS yang menjadi wilayah tugas belum siap dari BPS pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan assignment petugas melalui web coolsis di jam-jam yang tidak sibuk seperti pada tengah malam dan di waktu subuh. 2. Memperbanyak petugas assignment dan membagi tugas per kecamatan kepada petugas assignment agar bisa mempercepat proses assignment petugas lapangan.

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
		3. Banyak bersabar dan berdoa semoga web coolsis tidak lemot lagi.
MOBILE POSITIONING DATA (MPD) DAN METROPOLITAN STATISTICAL AREA (MSA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terpenuhinya relawan yang sesuai dengan kriteria di beberapa lokasi kecamatan di WM Patungraya Agung. 2. Pendataan menggunakan aplikasi ICS yang sering bermasalah pada aplikasi sehingga menghambat proses pendataan. 3. Kondisi sinyal internet di beberapa wilayah yang tidak stabil sehingga menghambat proses pengiriman data. 4. Lokasi relawan yang menyebar di setiap desa sehingga mobilitas PPL untuk mendata sedikit terkendala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta BPS kabupaten/kota MSA MDP 2021 membuat surat yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kecamatan yang tidak dapat memenuhi relawan sejumlah yang ditargetkan. 2. PPL diminta untuk rutin melakukan back up data karena dikhawatirkan ada data yang hilang saat aplikasi ICS tidak dapat digunakan. 3. PPL melakukan pengisian data secara offline terlebih dahulu, dan setelah berada di lokasi yang sinyal internetnya kuat baru dilakukan pengiriman data. 4. PPL berkomunikasi dengan relawan untuk menentukan waktu untuk bertemu

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
		<p>melakukan pendataan. Karena jika tidak berkomunikasi terlebih dahulu dikhawatirkan PPL tidak dapat bertemu tatap muka dengan relawan.</p>
<p>SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL MARET 2021</p>	<p>Kesulitan dalam upload di aplikasi karena berada di lokasi yang susah sinyal, serta responden yang susah ditemui atau sedang bepergian</p>	<p>Pembentukan group sosial media (whatsapp) dalam mempercepat koordinasi di lapangan.</p>
<p>SUSENAS MODUL SOSIAL BUDAYA DAN PENDIDIKAN</p>	<p>Beberapa BPS Kab/Kota belum selesai melaksanakan kegiatan pendataan hingga batas akhir pelaksanaan karena terkendala wilayah yang susah sinyal, responden susah ditemui atau sedang bepergian. Meskipun demikian respon rate tetap mencapai 100 persen</p>	<p>Koordinasi yang intensif dengan BPS Kab/Kota agar kendala/masalah cepat teratasi</p>
<p>STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN, SLHI, DAN SDLP</p>	<p>Data yang diterima dari dinas/instansi tidak konsisten setiap tahunnya; Data yang tersedia di dinas/instansi tidak sepenuhnya sesuai dengan</p>	<p>BPS akhirnya menggunakan format data tahun sebelumnya yang sudah dirilis. Sebelumnya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>data yang diminta kuesioner; Konsep definisi yang digunakan belum jelas, sehingga pengisian data dilakukan berdasarkan persepsi masing-masing petugas, Data dari dinas/instansi hanya berupa perkiraan, dinas belum memiliki peralatan dan metodologi yang sesuai standar</p>	<p>dinas/instansi.; Konfirmasi dengan dinas/instansi agar data yang dibutuhkan kuesioner bisa dipenuhi; Agar penjelasan kondef bisa dipertegas dalam buku pedoman dan disampaikan pada saat pelatihan/briefing; Meskipun data hanya perkiraan (estimasi), diharapkan agar dinas/instansi bisa menggunakan dasar estimasi yang jelas dan masuk akal</p>
<p>SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi pendataan yang cukup jauh dari ibukota kabupaten dan tidak terdapat sinyal sehingga pengiriman data agak terhambat; 2. Tidak semua petugas SPAK 2021 berpendidikan minimal DIV/S1, karena keterbatasan SDM di kabupaten/kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman data dilakukan setelah semua ruta dalam BS tersebut selesai dicacah. Pengiriman data dilakukan dilokasi yang bagus sinyal internetnya; 2. Petugas SPAK 2021 sebagian besar berpendidikan DIV/S1. Ada juga yang berpendidikan di bawah DIV/S1, tetapi petugas tersebut telah

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>3. Tidak ada pembiayaan untuk melakukan supervisi.</p>	<p>berpengalaman pada SPAK tahun-tahun sebelumnya;</p> <p>3. Supervisi tetap dilakukan walaupun tanpa biaya dengan mengunjungi lokasi sampel terdekat di Kota Palembang dan yang teridentifikasi sangat perlu untuk dilakukan supervisi</p>
<p>PENDATAAN POTENSI DESA</p>	<p>1. Beberapa petugas mengalami kendala saat menggunakan ICS. Terkadang beberapa rincian pertanyaan tidak muncul, loading yang lama, ini juga kemungkinan karena sinyal yang tidak stabil.</p> <p>2. Data kelurahan tidak lengkap dan kurang update</p>	<p>1. Dusahakan agar petugas menggunakan smartphone dengan spesifikasi RAM minimal 8 GB agar tidak begitu terkendala dengan aplikasi ICS.</p> <p>2. Data yang tidak lengkap diusahakan dengan bisa tersedia dengan metode estimasi yang bisa dipertanggungjawabkan.</p>

FUNGSI STATISTIK PRODUKSI



Sub Fungsi Statistik Pertanian

Survei Pertanian Tanaman

Pangan/Ubinan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya subsektor tanaman pangan yang meliputi tanaman padi, palawija dan jagung. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dukungan data yang lengkap, akurat, dan terkini sangat dibutuhkan dalam rangka formulasi kebijakan terkait pangan. Survei Pertanian Tanaman Pangan/ Ubinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dilakukan untuk menyediakan data produksi tanaman pangan dan data pendukung lain terkait luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya mesin pertanian serta data perbenihan. Data produktivitas diperoleh melalui Survei Ubinan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan rumah tangga berdasarkan pengukuran langsung di lapangan. Sementara itu, data luas tanam, luas panen, luas baku

lahan menurut penggunaan, banyaknya alat atau mesin pertanian, informasi penggunaan pupuk dan benih diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) yang dilakukan secara lengkap diseluruh wilayah kecamatan di Indonesia berdasarkan laporan Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD).

Selama tahun 2021, pengumpulan data luas panen melalui pendataan Survei Pertanian (SP) yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian masih terus berlanjut. Pengumpulan data luas panen khususnya palawija masih digunakan sebagai data guna perhitungan produksi tanaman palawija. Sedangkan untuk tanaman padi, meskipun pengumpulan data SP-Padi masih ada, namun data yang digunakan sebagai dasar perhitungan produksi beras sudah menggunakan luas lahan hasil Survei KSA.

Output survei ini adalah Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Tahun 2021, Publikasi Direktori Perusahaan Pertanian Tahun 2021, Analisis Produktivitas

Padi di Sumatera Selatan 2020 (Hasil Survei Ubinan) dan Analisis Produktivitas Jagung di Sumatera Selatan 2020 (Hasil Survei Ubinan).

Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian

Subsektor hortikultura telah berkontribusi secara nyata dalam mendukung perekonomian nasional baik dalam penyediaan produk pangan, Kesehatan dan kosmetika, perdagangan, penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka ketersediaan data statistik hortikultura, kegiatan Survei Hortikultura menjadi penting untuk dilakukan agar dengan data yang akurat dan rinci rencana evaluasi kebijakan yang telah dijalankan dan kebijakan ke depan dapat disusun dengan lebih terarah dan tepat sasaran.

Maksud dan tujuan kegiatan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian Tahun 2021 adalah untuk mendapatkan data tanaman hortikultura (luas/jumlah tanaman, produksi dan rata-rata harga di petani) pada tingkat kecamatan untuk komoditas sayuran dan buah-buahan semusim, buah-buahan dan sayuran tahunan, tanaman biofarmaka dan tanaman hias serta untuk struktur ongkos, profil perusahaan hortikultura/petani usaha

serta karakteristik usaha tanaman hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian selama tahun 2021 meliputi pengumpulan data: 1. Statistik Pertanian Hortikultura Tanaman Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim (SPH-SBS) Bulanan; 2. Statistik Pertanian Hortikultura Tanaman Buah-buahan dan Sayur-sayuran Tahunan (SPH-BST) Triwulanan; 3. Statistik Pertanian Hortikultura Tanaman Biofarmaka (SPH-TBF) Triwulanan; 4. Statistik Pertanian Hortikultura Tanaman Hias (SPH-TH) Triwulanan; 5. Statistik Pertanian Hortikultura Benih (SPH-BN) Tahunan; 6. VN-HORTI tahunan.

Output dari kegiatan ini pada tahun 2021 adalah Publikasi Statistik Buah-Buahan dan Sayur-sayuran Tahunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Publikasi Statistik Tanaman Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 2020, Peta Tematik Statistik Pertanian Provinsi Sumatera Selatan 2020 serta Laporan



Pengawasan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian di Kabupaten Banyuwangi



Koordinasi dengan Dinas Pertanian mengenai Data Statistik di Kota Prabumulih

Survei Perusahaan Perkebunan

Data Statistik perusahaan perkebunan sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah di sektor perkebunan. Sehingga diperlukan data yang lengkap dan akurat agar evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Maksud dan tujuan survei ini yaitu untuk mendapatkan data perusahaan perkebunan yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan berbasis web untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat di subsektor perkebunan, serta tersedianya direktori perusahaan pertanian yang terbaru (up to date).

Survei perusahaan perkebunan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan dan Survei Perusahaan

Perkebunan Tahunan. Data yang dikumpulkan dalam Survei Perusahaan Perkebunan Triwulanan meliputi nama, alamat lengkap perusahaan, luas areal dan produksi, serta distribusi produksi dari tanaman perkebunan. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam Survei Perusahaan Perkebunan Tahunan meliputi jenis tanaman yang dibudidayakan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditas utama, tenaga kerja, dan struktur pendapatan. Di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) komoditas perkebunan, yaitu kelapa sawit, karet, tebu dan teh. Target Survei Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan saat ini terdiri dari 152 perusahaan untuk SKB Tahunan dan 153 perusahaan untuk SKB Triwulanan.

Selain kegiatan rutin SKB, pada tahun 2021 dilaksanakan Survei Komoditas Strategis Lada Tahun 2021 (VKOMSTRAT2021). Kegiatan VKOMSTRAT merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Subdit Fungsi Statistik Perkebunan BPS RI setiap tahun, namun untuk Provinsi Sumatera Selatan baru pada tahun 2021 menjadi salah satu sampel untuk komoditas lada.

Untuk kegiatan Survei Perusahaan Perkebunan selama tahun 2021, pengolahan dilakukan di <http://pengolahan.bps.go.id>. Pengolahan dilakukan di Provinsi dengan mengentri data paling lambat tiga bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir untuk kegiatan triwulanan dan untuk kegiatan

tahunan pengolahan dilakukan paling lambat bulan Agustus tahun berikutnya.

Pengolahan isian data mandiri oleh Perusahaan Perkebunan dilakukan pada aplikasi SEDAPP Online, situs <https://skb.bps.go.id/pb>. Pemasukan dokumen melalui SEDAPP Online akan otomatis masuk ke dalam basis data BPS, dengan memilih pilihan “sudah diinput di SKB BPS-PB” ketika melakukan entri di situs pengolahan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu Statistik Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 dan Laporan Statistik Perusahaan Perkebunan Tahun 2021.



Penyerahan Penghargaan Responden Terbaik Survei Perusahaan Perkebunan 2021 di Kabupaten Banyuasin



Pelatihan Petugas Survei Komoditas Strategis Perkebunan Lada Tahun 2021 secara online

Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area

Realibilitas data produksi komoditas pangan yang dihasilkan melalui sistem statistik produksi pertanian selalu menjadi perdebatan. Dalam rangka memperbaiki akurasi dan aktualitas data, suatu sistem estimasi produksi padi yang lebih akurat, cepat dan obyektif sangat diperlukan. Dengan kemajuan teknologi Geographic Information System (GIS) dan penginderaan jauh yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pengembangan teknologi statistik spasial yang didukung oleh sistem komunikasi data yang cepat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Teknologi spasial diwujudkan

dalam suatu sistem Kerangka Sampel Area (KSA) dan sistem komunikasi data dari lapangan ke pusat yang dibangun dengan memanfaatkan aplikasi berbasis Android.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki akurasi dan aktualitas data estimasi luas panen padi sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, cepat, dan obyektif. Output dari kegiatan ini berupa Laporan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area Tahun 2021 dan Berita Resmi Statistik.



Pelatihan KSA 2020 secara online di bulan Oktober 2020



Pengawasan pelaksanaan KSA 2020 di Kabupaten Musi Rawas

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TH

Subsektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Data perusahaan peternakan dan pemotongan ternak sangat strategis karena dapat digunakan untuk menggambarkan produksi daging/telur/susu secara nasional maupun provinsi. Survei Perusahaan Peternakan dan

Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Pemotongan Hewan (TPH) bertujuan untuk mendapatkan jumlah ternak yang dipotong, produksi daging, struktur ongkos, pengolahan dan pemasaran serta nilai tambah yang dapat digunakan dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penghitungan *supply-demand* daging.

Output dari survei ini adalah publikasi Statistik Pemotongan Ternak Provinsi Sumatera Selatan 2020 dan Laporan Statistik Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Tahun 2021.

Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

Perikanan merupakan subsektor pertanian yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi masyarakat di Indonesia. Selain itu, subsektor perikanan juga berperan penting dalam pembentukan PDB Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara maritim. Data statistik perikanan sangat diperlukan untuk mengetahui potensi sumber alami yang berguna untuk bahan perencanaan dan kebijaksanaan di bidang perikanan.

Badan Pusat Statistik mengumpulkan data perikanan terdiri atas data perusahaan perikanan, Pelabuhan Perikanan (PPS/PPN/PPP/PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Pendaratan Ikan Tradisional (PIT). Pengumpulan data dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Namun demikian, di Provinsi Sumatera Selatan sendiri hingga saat ini perusahaan perikanan baik budidaya maupun perikanan tangkap masih belum ada.

Di Provinsi Sumatera Selatan, hanya terdapat satu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang aktif beroperasi. PPI tersebut berlokasi di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Jakabaring ini masih tradisional (umumnya belum ada

dermaga yang permanen, skala pendaratan masih kecil, dikelola masyarakat setempat, bisa milik umum atau perseorangan). Output dari kegiatan ini adalah Laporan Statistik Perusahaan Perikanan, PP/TPI/PIT Tahun 2021.

Survei Perusahaan Kehutanan

Di Provinsi Sumatera Selatan, kontribusi sektor kehutanan adalah sebesar 1,58 persen pada tahun 2019, sektor keempat setelah sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar nilai tambah sektor pertanian. Salah satu penyumbang terbesar dalam peningkatan nilai tambah sektor kehutanan berasal dari perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan (HPHT). Perusahaan HPHT memberikan andil yang cukup besar terhadap pemenuhan permintaan bahan baku industri pengolahan hasil hutan untuk menunjang ekspor kayu olahan seperti kayu lapis dan kayu gergajian, juga untuk memenuhi konsumsi kayu di dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja.

Melalui pengumpulan data perusahaan HPHT, dapat tergambar jumlah perusahaan, luas areal, produksi kayu bulat, ketenagakerjaan, dan beberapa karakteristik lainnya. Sedangkan tersedianya data statistik yang akurat dan tepat waktu tentang perkembangan perusahaan HPH, setiap tahunnya akan sangat berarti bagi pemerintah dan pengusaha di dalam mengevaluasi penyusunan suatu perencanaan yang akan datang tentang kebutuhan akan kayu log sebagai bahan baku industri baik domestik maupun internasional. Output survei ini adalah Laporan Statistik Perusahaan Kehutanan tahun 2021.



Revisit Sampel Perusahaan Perkebunan



Pendaftaran DKT Triwulanan ke Dinas Kehutanan

Survei Pertanian Terintegrasi

Data statistik pertanian dan pedesaan pada level terkecil yang lebih akurat, rinci dan tepat waktu menjadi kebutuhan penting bagi setiap negara pertanian seperti Indonesia. Selain itu, adanya tuntutan sistem informasi pertanian yang terstandarisasi, tervalidasi dan menjadi rujukan internasional menjadi poin penting dalam rangka menuju *National Statistic Office* (NSO) yang berkelas dunia. Salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan Survei Pertanian Terintegrasi. Survei Pertanian Terintegrasi atau dalam bahasa internasional dikenal dengan nama *Agricultural Integrated Survey* (AGRIS) merupakan survei yang direkomendasikan oleh FAO dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan global yaitu program pencapaian SDGs terutama untuk indikator yang menjadi tanggung jawab FAO. Dalam rangka mencapai Agenda Pembangunan 2030 oleh PBB terkait

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tersebut, dibutuhkan lebih banyak data dalam pengukuran variabel-variabelnya.

Kondisi di Indonesia saat ini, data yang dikumpulkan oleh BPS dalam mendukung program TPB/SDGs terutama indikator pertanian masih sangat terbatas. Oleh karena itu, selain untuk memenuhi kebutuhan akan data pertanian, kegiatan Survei Pertanian Terintegrasi ini menjadi penting dilaksanakan untuk dapat membantu penyediaan data dalam mendukung TPB/SDGs. Manfaat dari Kegiatan Pendataan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2021 adalah dihasilkannya indikator SDG's sektor pertanian pada level provinsi dan nasional. Output survei ini adalah Laporan Kegiatan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2021.



Pengawasan Pendataan SITASI 2021 oleh Deputi Bidang Statistik Produksi



Pelatihan Instruktur Daerah (Inda) SITASI 2021

Sub Fungsi Statistik Industri

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam PDB nasional, untuk itu diperlukan indikator dini untuk mengamati perkembangan industri manufaktur. Salah satu indikator tersebut adalah indeks produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS) yang disajikan dalam bentuk periode waktu triwulanan. Indeks produksi tersebut dihasilkan dari pengolahan Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan yang datanya diperoleh dari beberapa perusahaan industri manufaktur besar dan sedang yang terpilih sebagai sampel.

Secara umum Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan bertujuan untuk menggambarkan perkembangan produksi sektor industri manufaktur secara lebih dini yang dapat digunakan sebagai bahan

perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. Data yang dikumpulkan adalah tentang jumlah produksi dan nilai produksi per bulan dari perusahaan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2 digit.

Output survei ini adalah Publikasi Produksi Industri Manufaktur Provinsi Sumatera Selatan 2020, Laporan Statistik Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan tahun 2021 dan angka indeks pertumbuhan produksi IBS yang dirilis setiap triwulan. Sejak pandemi covid-19, terjadi penundaan rilis angka indeks pertumbuhan produksi IMK pada periode triwulan 1 sampai 3 tahun 2021 yang tidak dipublikasikan di level nasional maupun daerah.

Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

Survei Industri Manufaktur Besar dan Sedang Tahunan pada dasarnya adalah pencacahan lengkap yang dilakukan setiap tahun. Pencacahan dilakukan dalam dua tahap yaitu

Updating Direktori dan pencacahan lengkap perusahaan Industri Manufaktur. Pencacahan dilakukan dengan menggunakan frame tahun sebelumnya dan diperbaiki dengan metode

updating direktori yang data tambahannya berasal dari data kementerian lain, dinas terkait, asosiasi dan data sekunder yang dapat dipertanggung jawabkan.

Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan bertujuan untuk memperoleh data industri manufaktur secara lengkap baik produksi yang dihasilkan maupun bahan baku yang digunakan, mengetahui penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur, dan

memperoleh gambaran untuk perkembangan industri manufaktur yang ada di Indonesia. Metodologi penarikan sampel menggunakan pendataan lengkap.

Output dari kegiatan ini pada tahun 2021 adalah Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Selatan 2019 dan Laporan Statistik Industri Besar dan Sedang (IBS) Tahunan 2021 BPS Provinsi Sumatera Selatan.



Pemberian Piagam Penghargaan kepada Responden Survei IBS Tahunan



Pencacahan Survei IBS Tahunan

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan

Pengembangan usaha industri mikro dan kecil (IMK) dipandang sebagai hal yang penting dalam pengembangan sektor industri. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 telah menempatkan industri kecil pada khususnya sebagai bagian kontributor perekonomian nasional.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat terkait pengambilan kebijakan dan pengembangan sektor industri pengolahan khususnya industri mikro dan kecil, BPS menyelenggarakan kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2020 Tahunan (selanjutnya disebut VIMK19-Tahunan). Survei IMK ini diharapkan akan memberikan gambaran profil dan data IMK secara menyeluruh yang meliputi sebaran industri mikro dan kecil, bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya. Beberapa butir pertanyaan terkait penerapan teknologi ditambahkan agar dapat digunakan oleh pengambil kebijakan sebagai

bahan masukan implementasi Making Indonesia 4.0.

Secara umum VIM21-Tahunan bertujuan untuk mengetahui profil daerah potensi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK21-Tahunan akan mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan usaha/perusahaan berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut 2 digit pertama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional dan provinsi.

Output kegiatan survei ini adalah berupa Laporan Statistik Industri Mikro dan Kecil (VIMK20) Tahun 2020 BPS Provinsi Sumatera Selatan, Publikasi Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Selatan 2021, dan Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Selatan 2019.



Pencacahan Survei IMK Tahunan



Pelatihan Online Survei IMK Tahunan

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan merupakan survei yang dilakukan secara sampel terhadap usaha/perusahaan industri mikro (memiliki tenaga kerja 1-4 orang) dan usaha/ perusahaan industri kecil (memiliki tenaga kerja 5-19 orang) yang dicacah secara panel pada setiap triwulannya.

Tujuan survei ini untuk mengetahui pertumbuhan produksi IMK di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. Secara khusus, survei IMK tahun 2020 Triwulanan akan menyajikan data pertumbuhan produksi usaha/perusahaan berskala mikro dan kecil

menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2-digit pada tingkat nasional dan provinsi.

Output survei ini adalah Laporan Statistik Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan Tahun 2021 dan angka indeks pertumbuhan produksi IBS yang dirilis setiap triwulan. Oleh karena adanya pengaruh pandemi covid-19, berdampak pada penundaan rilis angka indeks pertumbuhan produksi IMK pada periode triwulan 1 sampai 3 tahun 2020 yang tidak dipublikasikan di level nasional maupun daerah.



Pengawasan Survei IMK Triwulanan



Pembahasan Angka Indeks Pertumbuhan Produksi Survei IMK Triwulanan

Sub Fungsi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi

Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, *Captive Power*, dan Updating Direktori

Survei pertambangan, energi, penggalian dan updating direktori merupakan survei rutin yang dilakukan setiap tahun untuk menghasilkan statistik terkait kegiatan di bidang pertambangan, penggalian, listrik, gas, dan air bersih di Indonesia. Karakteristik yang dikumpulkan umumnya merupakan statistik dasar yang diperlukan dalam penyusunan PDB Indonesia, antara lain nilai dan kuantitas produksi, struktur biaya produksi dan jumlah tenaga kerja, upah gaji pekerja.

Selain kegiatan survei, setiap tahun juga dilakukan kegiatan pemutakhiran data pokok (Updating) perusahaan dalam bentuk direktori

perusahaan yang sekaligus menjadi sampling frame kegiatan survei-survei bidang pertambangan, penggalian, listrik, gas, dan air bersih. Updating direktori perusahaan bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan yang sudah tutup, pindah alamat atau perusahaan yang baru berdiri.

Output dari semua kegiatan survei adalah Publikasi Statistik Air Minum Provinsi Sumatera Selatan 2018-2020 dan Laporan Statistik Pertambangan, Energi, Penggalian, *Captive Power* dan Updating Direktori Tahun 2021.



Pengawasan Survei Air Bersih ke PDAM Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim



Koordinasi Survei Pertambangan Energi dengan petugas pendataan di Kab. Muba

Survei Konstruksi

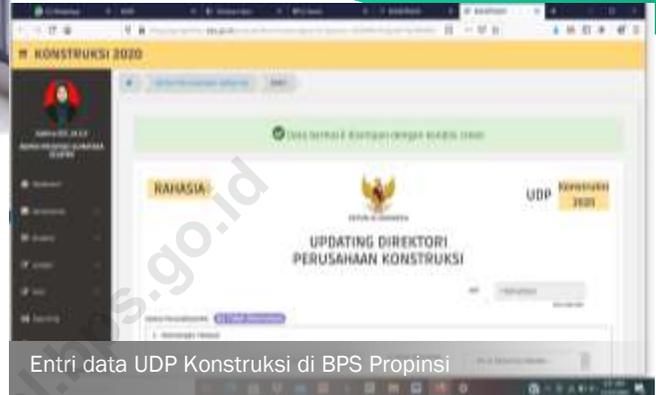
Sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional disamping memberi peluang kesempatan kerja. Untuk memonitor pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia maka data statistik konstruksi yang aktual dan akurat serta berkesinambungan dalam periode waktu tertentu sangatlah dibutuhkan. Pengumpulan data sektor konstruksi dilakukan secara berkala melalui pengutipan direktori perusahaan konstruksi, updating direktori perusahaan Konstruksi (UDP-Konstruksi), Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH), dan Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR), dan Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP) setiap 2-3 tahun sekali. Pengolahan untuk UDP dan SKTR dilakukan di pusat dan daerah dengan SIM Konstruksi Online, selanjutnya SKTH dan SKP juga akan di olah di daerah dengan SIM Konstruksi On-line. Adapun karakteristik data yang dikumpulkan pada survei ini, yaitu meliputi direktori perusahaan yang sekaligus

menjadi sampling frame untuk kegiatan survei-survei konstruksi, nilai konstruksi yang diselesaikan, struktur biaya produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, beberapa indikator konstruksi, indeks masalah, kondisi, dan prospek bisnis.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat, rinci, dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala baik data mengenai sebaran nilai produksi atau output menurut lokasi operasi perusahaan, data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, data mengenai penyebaran tenaga kerja, upah/gaji, struktur pemodal, pemakaian bahan, dan struktur biaya lainnya serta jumlah dan nilai produksi menurut lokasi perusahaan sehingga dengan demikian dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai. Output dari survei ini berupa Publikasi Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Sumatera Selatan 2021 dan Laporan Statistik Konstruksi Tahun 2021.



Supervisi Survei Konstruksi ke LPSE Kab.



Entri data UDP Konstruksi di BPS Propinsi

INOVASI 2016 - 2021

- Aplikasi IMK Triwulanan Sumatera Selatan merupakan Aplikasi berbasis android yang berisi data hasil pencacahan IMK Triwulan sebelumnya sebagai referensi untuk petugas dalam mengisi pendataan lapangan survei IMK Triwulanan BPS Provinsi Sumatera Selatan.

SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN

<https://sumsel.bps.go.id>

KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
<p>SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN</p>	<p>1. Blok Sensus sampel palawija yang diberikan seringkali tidak cukup berpotensi memenuhi target sampel rumah tangga palawija bahkan beberapa kali didapatkan blok sensus yang tidak memiliki sampel rumah tangga palawija, demikian juga dengan blok sampel sampel cadangan/pengganti.</p> <p>2. Target tidak terpenuhi (secara umum akibat lewat panen)</p> <p>3. Terjadinya serangan virus ransomware di jaringan BPS Pusat pada bulan Maret, yang menyebabkan kegiatan pengolahan ubinan baik padi dan palawija menjadi terganggu. Bahkan sebagian data ubinan KSA Padi Subround I yang sudah diinput melalui aplikasi ICS</p>	<p>1. BPS Kab/Kota agar cepat tanggap mengajukan penggantian blok sampel dengan merekomendasikan wilayah sampel pengganti yang lebih representative</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan petani dan meningkatkan pengawasan</p> <p>3. Perlu adanya update aplikasi dan peningkatan kualitas server sehingga pengiriman data hasil ubinan tidak terganggu.</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	menjadi hilang dan tidak dapat dipulihkan.	
PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA	Cuaca ekstrim sehingga akses jalan menuju sampel segmen pengamatan banyak terendam banjir; Terdapat kendala dalam pengiriman data hasil pengamatan Pandemi covid19 menyebabkan kegiatan lapangan terhenti pada bulan Maret dan April 2020.	Perlu adanya peningkatan kualitas server sehingga pengiriman data tidak terganggu; Kegiatan pendataan tetap dilanjutkan pada bulan Mei-Desember dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN	Pengetahuan petugas minim karena tidak pernah ada briefing/pelatihan; kuisiонер yang diterima petugas entri di BPS Kabupaten/Kota beberapa komoditas tidak lengkap isiannya sehingga kegiatan pengolahan menjadi lebih lama; keterlambatan pemasukan dokumen sehingga menghambat proses pengolahan data	Diadakan pelatihan/briefing untuk meningkatkan pemahaman petugas; peningkatan koordinasi dengan petugas dari Dinas Pertanian
SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN	1. Banyak perusahaan perkebunan yang lockdown	Data perusahaan saat kondisi lockdown tetap ditanyakan

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>akibat pandemi sehingga menghambat proses pendataan;</p> <p>2. beberapa perusahaan perkebunan swasta tidak kooperatif dalam memberikan data</p> <p>3. Tidak ada pelatihan maupun briefing petugas survei lapangan di BPS Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan pengetahuan dan pemahaman petugas akan kegiatan survei yang dilakukan cukup minim.</p> <p>4. Perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan tidak dapat memberikan data yang diperlukan karena data tersebut berada di kantor pusat, Jakarta.</p> <p>5. Pada VKOMSTRAT dengan moda CAPI, terdapat beberapa kendala terkait server aplikasi.</p>	<p>pada triwulan berikutnya; peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat survei perkebunan ke pelaku usaha sector perkebunan sehingga muncul kesadaran dari para pengusaha perkebunan untuk berpartisipasi dalam pengisian survei perusahaan perkebunan baik melalui pengisian mandiri (SEDAPP Online) maupun pendataan menggunakan dokumen oleh petugas BPS.</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH	Sampel perusahaan besar sulit memberikan data, prosedur berbelit, berakibat pada keterlambatan pemasukan dokumen; tidak ada pelatihan petugas, pemahaman petugas minim terkait pertanyaan survei	Perlu adanya surat resmi dari BPS RI untuk survei perusahaan peternakan berskala besar ; diadakan pelatihan/briefing untuk meningkatkan pemahaman petugas
SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/P	Tidak ada pelatihan petugas, pemahaman petugas minim terkait pertanyaan survei; petugas PPI sulit mengumpulkan data karena kondisi PPI kurang dimaksimalkan, data triwulanan baru bisa diberikan di akhir tahun untuk tiga triwulan sekaligus	Diadakan pelatihan/briefing untuk meningkatkan pemahaman petugas; Rekomendasi kepada dinas terkait untuk bisa memaksimalkan fungsi PPI agar data mudah diperoleh
SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN	Sampel perusahaan besar sulit memberikan data, prosedur berbelit, berakibat pada keterlambatan pemasukan dokumen; tidak ada pelatihan petugas, pemahaman petugas	Diadakan pelatihan/briefing untuk meningkatkan pemahaman petugas

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	minim terkait pertanyaan survei	
SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN	Perusahaan tidak mau memberikan data, tidak ada kewenangan dari kantor pusat; isian dokumen kurang lengkap dan rinci, penjelasan terkait fenomena kenaikan/penurunan produksi dari bulan sebelumnya kurang lengkap	Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan sampel perusahaan; laporan ke Pusat terkait perusahaan yang tidak mau memberikan data agar segera bisa ditindaklanjuti Pusat; pemeriksaan berjenjang terhadap isian dokumen perusahaan, jika ditemui yang meragukan dilakukan revisit.
SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN	Perusahaan sulit ditemui, pemasukan dokumen rendah; jadwal kegiatan updating diperpanjang akibat pandemi covid19	Peningkatan koordinasi dan sosialisasi ke perusahaan
SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TAHUNAN	Petugas tidak dilatih sehingga salah mengidentifikasi KBLI kegiatan usaha/perusahaan, hal ini berdampak pada kesalahan penarikan sampel	Pelatihan petugas secara berkala
SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN	Petugas tidak dilatih sehingga salah mengidentifikasi KBLI kegiatan usaha/perusahaan,	Pelatihan petugas secara berkala

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	hal ini berdampak pada kesalahan penarikan sampel	
SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI	Dokumen pendataan terlalu rinci dan banyak, perusahaan harus membagi pengisian dokumen ke divisi yang berbeda, cukup riskan dan menyebabkan dokumen hilang/tercecer; lockdown di beberapa perusahaan akibat pandemi, petugas sulit melakukan pendataan; kebanyakan perusahaan di daerah hanya kantor cabang dan tidak mempunyai wewenang memberikan data	Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan CP perusahaan untuk memonitor pengisian dokumen; BPS RI agar memikirkan penyusunan kuesioner yang lebih sederhana agar pendataan bisa dilakukan via online. Bahkan jika memungkinkan agar dibuatkan perjanjian kerjasama (Mou) untuk pengisian secara mandiri oleh pihak perusahaan; pengumpulan data di ambil alih oleh BPS Pusat terutama untuk perusahaan yang kantor utamanya berada di Kota Jakarta.
SURVEI KONSTRUKSI	kebanyakan perusahaan di daerah hanya kantor cabang dan tidak mempunyai wewenang memberikan data	Perlu adanya surat resmi dari BPS RI bahkan diupayakan untuk membuat perjanjian kerjasama (Mou)

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>yang sifatnya cukup rahasia; terlalu detailnya rincian pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner sehingga perusahaan tidak berkenan memberikan data; kebijakan penggantian sampel pada perusahaan sampel yang tidak memiliki proyek selama TW 1 dan 2 tahun 2021 sehingga menghambat pemasukan dokumen triwulan berikutnya.</p>	<p>terutama untuk asosiasi, perusahaan konstruksi berskala besar ataupun perusahaan cabang yang memiliki kantor pusat di provinsi lain; BPS RI juga perlu memikirkan rancangan kuesioner yang lebih sederhana guna permintaan data ke perusahaan sehingga memungkinkan pendataan dilakukan secara online baik via telepon maupun email ke perusahaan, bahkan jika memungkinkan perusahaan agar diberi akses untuk mengisi data langsung secara mandiri ke Sistem Pengolahan Konstruksi Online (SKO).</p>

FUNGSI STATISTIK DISTRIBUSI



Sub Fungsi Statistik Niaga dan Jasa

Kompilasi Data Statistik Ekspor

Data statistik impor Indonesia dikompilasi dari dokumen yang telah diisi oleh importir dan telah disahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Beberapa jenis dokumen impor meliputi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC21),

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu menghasilkan data ekspor setiap bulan baik volume maupun nilai, yang dirinci menurut

komoditi, negara tujuan, provinsi asal dan pelabuhan muat, serta memberikan informasi dan analisis perkembangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data.

Output dari survei ini berupa berupa Berita Resmi Statistik (BRS) yang terbit setiap bulan dan Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Provinsi Sumatera Selatan 2020.



Data statistik impor dikompilasi dari dokumen yang telah diisi oleh importir dan telah disahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Beberapa jenis dokumen impor meliputi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC20), impor kawasan berikat (BC23), pemberitahuan impor barang khusus (PIBK/BC21), dokumen pemasukan/pengeluaran ke dan dari Free Trade Zone (PPFTZ), dan dokumen Pusat Logistik Berikat (PLB). Dalam hal pencatatan transaksi perdagangan impor, secara keseluruhan dilakukan oleh KPPBC di seluruh wilayah pabean Indonesia.

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi

Dalam mengukur Pertumbuhan ekonomi BPS menggunakan data PDB (Produk Domestik Bruto). Ada beberapa sektor perekonomian yang menjadi penggerak dari nilai PDB/PDRB yaitu sektor perdagangan (G), sektor pengangkutan dan pergudangan (H), sektor informasi dan komunikasi (J), sektor keuangan (K) dan Administrasi/Keuangan Pemerintah (O). Penyusunan PDB/PDRB memerlukan data statistik sektoral salah satunya adalah data produksi/indikator produksi. Untuk itu, BPS menyelenggarakan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan data statistik impor yang dirinci menurut komoditi, negara asal, provinsi pelabuhan bongkar, dan provinsi KPPBC. Variabel penting dalam penyajian data statistik impor adalah volume dan nilai, baik selama bulan berlaku maupun kumulatif selama periode waktu tertentu. Selain itu, juga dihasilkan data impor menurut penggunaan barang impor di dalam negeri.

Output dari survei ini berupa Berita Resmi Statistik (BRS) yang terbit setiap bulan dan Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Provinsi Sumatera Selatan 2020.

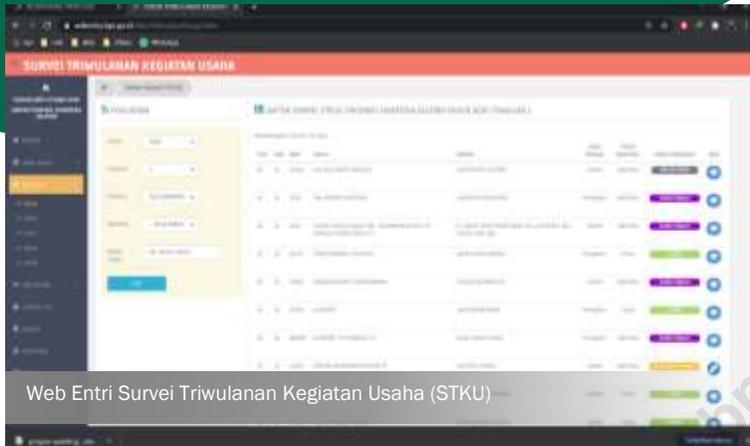
Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) secara terintegrasi.

Tujuan dari Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi Tahun 2021 adalah :

- a. Menyediakan data tentang indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha terkini pada sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor informasi, serta sektor keuangan secara triwulanan.

b. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mendukung penyusunan PDB/PDRB Triwulanan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan STKU Terintegrasi adalah Laporan Statistik Distribusi Tahun 2021.



Web Entri Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU)



Pendataan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU)

Survei Pola Distribusi Barang Dan Jasa

Pola distribusi perdagangan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia saat ini diduga masih bermasalah. Hal ini terlihat dari fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi. Untuk menggambarkan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa pada beberapa komoditas terpilih.

Tujuan dari Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa adalah :

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa adalah Laporan Statistik Distribusi Tahun 2021.



Pengawasan Pendataan Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa

Survei Waktu Tunggu (*Dwelling Time*) di Pelabuhan

Salah satu penyumbang utama tingginya biaya logistik di Indonesia adalah waktu tunggu (*dwelling time*) di Pelabuhan. Dengan mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan

sarana transportasi yang memadai, maka dapat menghilangkan atau mengurangi terjadinya hambatan kelancaran arus distribusi barang dalam negeri maupun luar

negeri sehingga dapat menurunkan biaya logistik yang mesti ditanggung para pelaku usaha terkait. Kelancaran arus distribusi barang sulit dicapai tanpa didukung oleh Tujuan dari Survei Waktu Tunggu (*Dwelling Time*) di pelabuhan adalah :

- a. Mendapatkan dan menyajikan data/informasi indikator waktu lamanya barang berada (tertahan) di pelabuhan.
- b. Mendapatkan dan menyajikan data/informasi perkembangan pendapatan usaha dari pelaku usaha logistik yang kegiatan operasional usahanya berkaitan dengan aktifitas di pelabuhan.

Kompilasi Data Transportasi

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana pembangunan sektor transportasi dirancang untuk tiga tujuan yaitu: mendukung gerak perekonomian, stabilitas nasional dan juga mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan memperluas jangkauan arus distribusi barang dan jasa.

Tujuan dari Survei Kompilasi Data Transportasi adalah:

- a. Mendapatkan data jumlah Bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Jumlah Truk/angkutan barang menurut Badan

peningkatan efisiensi tata laksana melalui cara-cara seperti mempersingkat waktu tunggu barang di pelabuhan (*dwelling time*).

- c. Mendapatkan dan menyajikan data/informasi operasional usaha serta situasi bisnis berdasarkan pengalaman/pendapat pelaku usaha logistik yang kegiatan operasional usahanya berkaitan dengan aktifitas di pelabuhan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Waktu Tunggu (*Dwelling Time*) di pelabuhan adalah Laporan Statistik Distribusi Tahun 2021.

Hukum, tahun pembuatan, bahan bakar, dan daya angkut;

- b. Mendapatkan data panjang jalan (Negara, Provinsi, Kab/Kota);
- c. Mendapatkan data lalu lintas angkutan udara menurut bandara asal/tujuan meliputi: pesawat berangkat, pesawat datang, penumpang naik-turun-transit, bongkar muat barang, bagasi, dan pos/paket;
- d. Mendapatkan data bongkar muat barang, kunjungan kapal dan penumpang di pelabuhan laut.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Kompilasi Data Transportasi adalah:

- a. Publikasi Statistik Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan 2020

- b. BRS Statistik Transportasi yang dirilis setiap bulan

Survei Perdagangan Antar Wilayah

Peran perdagangan dalam suatu daerah sangat penting, sehingga perlu diketahui profil usaha perdagangan baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, gambaran mengenai data perdagangan domestik, serta perdagangan antar wilayah.

Tujuan Survei Perdagangan Antar Wilayah adalah:

- a. Mendapatkan profil sektor perdagangan,
- b. Mendapatkan nilai perdagangan (Rp),

- c. Mendapatkan nilai (Rp) dan volume (kg) perdagangan antar wilayah,
- d. Mendapatkan peta perdagangan antar wilayah,
- e. Mengetahui moda transportasi utama yang digunakan

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Perdagangan Antar Wilayah adalah Laporan Statistik Distribusi Tahun 2021.

Survei Karakteristik Usaha (*Business Characteristics Survey*)

Dibutuhkan data dan Informasi tentang karakteristik usaha yang meliputi informasi umum perusahaan, tenaga kerja, struktur usaha, informasi dasar keuangan, inovasi serta penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk beberapa kategori usaha UMB (usaha menengah besar).

Tujuan Survei Karakteristik Usaha (*Business Characteristics Survey*) adalah untuk menyusun:

- a. Indikator penggunaan dan pemanfaatan TIK.
- b. Indikator produktivitas perusahaan bioskop.

c. Indikator pokok terkait kegiatan inovasi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Karakteristik Usaha (*Business*



Characteristics Survey) adalah Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Tahun 2021.



Survei Bidang Jasa Pariwisata

Kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang dan luas dari berbagai kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya.

Tujuan Survei Bidang Jasa Pariwisata adalah mengumpulkan data jumlah usaha akomodasi, baik akomodasi berbintang maupun non bintang, profil usaha akomodasi, kapasitas

usaha akomodasi, perkembangan usaha akomodasi, jumlah tenaga kerja usaha akomodasi, dan sebagainya. Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Bidang Jasa Pariwisata adalah:

- a. BRS Perkembangan Pariwisata Sumatera Selatan
- b. Publikasi Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Sumatera Selatan 2020

Survei Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama kemampuannya dalam menggerakkan perekonomian negara melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara mampu menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Wisatawan Nusantara adalah Laporan Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2021.

Tujuan Survei Wisatawan Nusantara adalah mendapatkan data/informasi jumlah perjalanan dan profil wisnus seperti karakteristik demografi, pola perjalanan, serta rata-rata pengeluaran/konsumsi wisatawan nusantara.



Pendataan Statistik *E Commerce*

Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan *e-commerce*. Fenomena *e-commerce* menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko.

Tujuan Pendataan Statistik *E Commerce* adalah:

- a. Menyediakan data distribusi pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia.

- b. Menyediakan indikator pokok yang terkait dengan *e-commerce* (jumlah usaha, volume transaksi, nilai transaksi) yang sesuai dengan konsep standar internasional.
- c. Mendukung penyusunan PDB Triwulanan di Era Digital, dengan menyajikan perkembangan transaksi *e-commerce* di Era Digital.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Pendataan Statistik *E Commerce* adalah Laporan Statistik *E-Commerce* Tahun 2021.



Sub Fungsi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Survei Statistik Harga Produsen

Fluktuasi harga biasanya dimulai pada tingkat harga produsen, yang kemudian menular (*contagion effect*) pada level harga selanjutnya, yaitu harga perdagangan besar dan harga eceran. Harga produsen sebagai harga pertama merupakan price leader dari level harga lainnya. Pada level harga ini perlu dilakukan monitoring perkembangannya sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap gejala harga pada level harga selanjutnya.

Data harga gabah dan beras didapatkan melalui Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan (HPBG) dan Survei Harga Gabah (HPG). Data harga gabah dan beras sangat diperlukan untuk mengetahui perubahan harga beras dan gabah secara berkala dan sebagai indikator dini untuk pemerintah dan pihak yang berkepentingan memantau dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Tujuan Survei Statistik Harga Produsen adalah:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan Indeks Harga Produsen (IHP) baik di daerah maupun tingkat nasional.
- b. Memberi gambaran harga di level produsen dan dampaknya bagi harga di level berikutnya.
- c. Sebagai informasi dan indikator dini bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak yang berkepentingan untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan harga dan menjaga kestabilan harga dari tingkat produsen sampai tingkatan yang paling akhir.
- d. Merekam perubahan data harga beras dari berbagai kualitas beras, harga gabah dan kualitas gabah di tingkat penggilingan.
- e. Sebagai indikator dini harga beras di tingkat konsumen, sehingga bisa memberikan langkah antisipatif oleh pihak yang berkepentingan terhadap transaksi harga beras, dan menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Statistik Harga Produsen adalah: Laporan Kegiatan Survei Harga Produsen Tahun 2021.

Survei Harga Perdesaan

Data harga, baik harga di tingkat produsen komoditas pertanian maupun harga-harga di tingkat konsumen perdesaan merupakan salah satu indikator ekonomi yang penting, sehingga sangat diperlukan penyajian data statistik harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan yang teratur, lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan.

Tujuan Survei Harga Perdesaan adalah mendapatkan data harga produsen perdesaan (sektor pertanian) yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) serta indikator harga lainnya.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Harga Perdesaan adalah Publikasi Nilai Tukar Petani dan Inflasi Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan 2020.

Survei Lembaga Keuangan dan Survei Badan Usaha dan Pasar Modal

Sejalan dengan pertumbuhan usaha lembaga keuangan, dibutuhkan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu untuk lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan perusahaan penunjang lembaga keuangan.

Tujuan Survei Lembaga Keuangan dan Survei Badan Usaha dan Pasar Modal adalah:

- a. Mendapatkan karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk masing-masing jenis usaha.

- b. Mendapatkan gambaran hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba (rugi) tiap kegiatan.
- c. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) untuk keperluan survei bidang ekonomi.
- d. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha di Indonesia menurut lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Statistik Lembaga Keuangan dan Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal adalah Laporan Statistik

Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Tahun 2021.

Survei Keuangan Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah melalui upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Tujuan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
- b. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.

- c. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
- d. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Tahun 2021.



Sub Fungsi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar

Survei Harga Perdagangan Besar

Dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas dengan memantau perkembangan harga. Perkembangan harga yang diperlukan pada tingkat distributor atau pedagang grosir karena masalah distribusi dilakukan oleh pedagang tersebut. Indikator tersebut adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang diperoleh dari Survei Harga Perdagangan Besar (HPB).

Tujuan Survei Harga Perdagangan Besar adalah:

- Mendapatkan data statistik Harga Grosir yang dapat dipercaya dan tepat waktu, untuk mengetahui perkembangan harga antar waktu.
- Untuk bahan penyusunan angka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) secara bulanan.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Harga Perdagangan Besar adalah Laporan Statistik Harga Perdagangan Besar Tahun 2021.



Survei Harga Konsumen Dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras

Survei Harga Konsumen (SHK) merupakan survei harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen). Survei ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tujuan Survei Harga Konsumen adalah mendapatkan data harga konsumen yang lengkap, akurat dan up to date. Harga

Indeks Kemahalan Konstruksi

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah.

Tujuan Survei Kemahalan Konstruksi adalah mengumpulkan data-data yang menjadi komponen penghitungan IKK. Data yang

Konsumen yang diperoleh digunakan sebagai penyusunan IHK serta memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Harga Konsumen adalah angka inflasi yang dirilis setiap bulan dan Publikasi Inflasi Provinsi Sumatera Selatan 2020.

dimaksud yaitu: data harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Survei Kemahalan Konstruksi adalah:

- a. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
- b. Laporan Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2021



Pendataan Survei Kemahalan Harga Konstruksi



Pendataan Survei Kemahalan Harga Konstruksi di salah satu toko bangunan di Kabupaten Musi Rawas

<https://sumsel>

INOVASI 2016 - 2021

- Aplikasi VHTS Sumatera Selatan merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk monitoring pelaksanaan pencacahan SurveiVHTS di BPS Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat daftar sampel VHTS, data kunjungan pendataan, sehingga dapat meningkatkan kualitas data hasil pendataan

SURVEI
BIDANG
JASA
PARIWISATA

<https://sumsel.bps.go.id>

KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI	Pada triwulan pertama masih ada beberapa kota yang tidak mendapatkan data, dikarenakan perusahaan merupakan unit/cabang sehingga data harus meminta dari pusat terlebih dahulu.	Pengajuan penggantian sampel STKU yaitu sebanyak 6 kali selama periode pelaksanaan survei.
SURVEI POLA DISTRIBUSI BARANG DAN JASA	Sulit menemukan pedagang besar tertentu untuk setiap komoditas; Fenomena penambahan/putus rantai sulit untuk dijelaskan.	Updating frame secara berkala sesuai dengan fungsi pelaku usaha; Kliping berita mengenai harga, stok, dan informasi lain terkait komoditas poldis pada tahun data publikasi; Penambahan pertanyaan pada kuesioner untuk menjawab fenomena tambah/putus rantai.
SURVEI WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) DI PELABUHAN	Kualitas isian kuesioner	Pengetahuan petugas ditingkatkan melalui pelatihan
KOMPILASI DATA TRANSPORTASI	Data dari responden kadang-kadang belum tersedia	MOU dengan instansi terkait.

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	sehingga pengiriman dokumen terlambat.	
SURVEI PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH	Banyaknya pergantian sampel terutama untuk daerah perkotaan sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam pemilihan sampel yang dilakukan dengan metode purposive	Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PMS dan SKF Distribusi
PENYUSUNAN DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN	Kegiatan tidak ground check ke pasar, tetapi kunjungan ke dinas sehingga data yg diperoleh kurang tajam dan kurang lengkap	Penambahan anggaran agar kegiatan updating dapat langsung ground check ke pasar.
SURVEI KARAKTERISTIK USAHA (<i>BUSINESS CHARACTERISTICS SURVEY</i>)	Responden sulit dihubungi dan diwawancarai dengan telepon; responden masih belum familiar dengan pengisian mandiri survei melalui link survei	Melakukan wawancara langsung dengan tetap mematuhi protocol kesehatan
SURVEI WISATAWAN NUSANTARA	Beberapa wilayah sampel BS merupakan daerah rawan konflik dan rawan begal sehingga petugas takut	Mengajukan penggantian sampel BS ke Pusat

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	mendata karena masalah keamanan	
PENDATAAN STATISTIK <i>E COMMERCE</i>	Jarak antar sampel/responden cukup jauh dengan alokasi petugas yang minim sehingga proses pendataan memakan waktu lebih lama dari perkiraan; program Capi dan Web Capi sering bermasalah	Penambahan waktu pelaksanaan lapangan; konsultasi terkait program Capi yang bermasalah dengan admin Provinsi
SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN	Kesulitan pendataan antara lain karena birokrasi perusahaan yang berbelit-belit, beberapa sampel perusahaan menolak memberikan data; pengumpulan dokumen molor dari jadwal karena keterbatasan petugas dan jadwal pelaksanaan kegiatan beberapa survei berbarengan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan; diharapkan jadwal pelaksanaan survei tidak berbarengan
SURVEI HARGA PERDESAAN	Belum pernah dilakukan pelatihan Survei Harga Pedesaan	Perlu dilakukan pelatihan petugas Survei Harga Pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi survei

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN DAN STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL	Kesulitan pendataan antara lain karena birokrasi perusahaan yang berbelit-belit, beberapa sampel perusahaan menolak memberikan data; pengumpulan dokumen molor dari jadwal karena keterbatasan petugas dan jadwal pelaksanaan kegiatan beberapa survei bersamaan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan; diharapkan jadwal pelaksanaan survei tidak bersamaan
SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Pemasukan dokumen sering terlambat karena harus menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat/BPK; Penolakan pengisian maupun wawancara dari aparat desa.	Agar BPS Pusat bisa memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan data; Peningkatan koordinasi dan sosialisasi dengan aparat desa terkait pendataan statistic keuangan pemda.
SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR	Penolakan pengisian maupun wawancara dari perusahaan sampel; keterlambatan pemasukan dokumen akibat sulitnya birokrasi perusahaan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan sampel
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	Komoditas di beberapa kabupaten memiliki kualitas	Pendataan dikembalikan ke sistem wawancara dengan

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	yang berbeda-beda; beberapa kabupaten tidak menggunakan satuan standar; akibat pandemi covid19, pendataan dialihkan melalui Whatsapp dan email, banyak sampel yang menolak didata	mengutamakan protokol kesehatan

<https://sumsel.bps.go.id>

FUNGSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK



Sub Fungsi Diseminasi Dan Layanan Statistik

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar Sektoral dan Khusus

Metadata kegiatan statistik dibedakan menjadi beberapa dimensi yaitu jenis kegiatan dan jenis metadata. Jenis kegiatan statistik, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari statistik dasar, sektoral, dan khusus. Sementara itu jenis metadata dapat dibedakan menjadi metadata deskriptif, teknis/struktural, dan administrasi.

Fungsi metadata ini bukan hanya untuk kepentingan pengguna data, tetapi juga untuk kepentingan pengelola dan lembaga. Bagi pengguna data dapat dimanfaatkan untuk mengenali atau mengidentifikasi bahkan mempelajari kegiatan statistik bahkan pembentukan produk yang dihasilkannya. Sementara itu, bagi pengelola akan membantu dalam pengelompokan atau pengklasifikasian kegiatan statistik. Dengan demikian, pengelolaan metadata dan kesinambungan kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien

dan efektif. Sementara itu, bagi lembaga penghasil, metadata sangat bermanfaat untuk dokumentasi kegiatan.

a. Pengembang data

Metadata dapat menghindari duplikasi, membagikan informasi yang sebenarnya, mempublikasikan usaha, mengurangi beban kerja, dan menjadi dokumentasi informasi data.

b. Pengguna data

Metadata dapat memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi baik dari dalam maupun luar organisasi, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung dan diestimasi.

Output dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar Sektoral dan Khusus ini adalah Ringkasan Metadata

Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus Provinsi Sumatera Selatan.

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mewujudkan dan mengembangkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Kebutuhan data statistik semakin kompleks. Hal ini menuntut agar penyelenggaraan kegiatan statistik bisa menghasilkan data dan informasi yang berkualitas. Kegiatan statistik tidak hanya diselenggarakan oleh BPS saja, namun bisa diselenggarakan oleh K/L/D/I maupun masyarakat/institusi swasta. Untuk itu diperlukan Pembinaan Statistik Sektoral berupa kegiatan Coaching Clinic Rekomendasi Statistik. Selama tahun 2021, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait tata cara pemberitahuan rancangan survei dari instansi pemerintah (OPD di lingkungan Pemprov Sumsel) kepada BPS; tata cara pemberian rekomendasi penyelenggaraan survei statistik sektoral oleh BPS kepada instansi pemerintah; dan tata cara entri atau pengajuan rekomendasi statistik melalui web entri rekomendasi (romantik.bps.go.id)

Manfaat yang didapat dengan terselenggaranya kegiatan ini adalah masing-masing OPD dapat memiliki pemahaman yang sama terkait tata cara pengajuan rekomendasi statistik sehingga Sistem Statistik Nasional (SSN) dapat terwujud dan terlaksana dengan baik di Provinsi Sumatera Selatan.

Output dari kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional adalah Laporan Kegiatan Coaching Clinic Rekomendasi Statistik Tahun 2021 dan Surat Rekomendasi Statistik.



Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

Penyusunan BRS dan Buku Saku Data dan Indikator Sosial setiap tahunnya untuk memberikan informasi mengenai data-data penting yang dihasilkan oleh BPS. Buku katalog publikasi disajikan untuk memberikan informasi daftar kumpulan publikasi BPS yang terbit setiap tahunnya. Penilaian terhadap Daerah Dalam Angka (DDA) perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas publikasi DDA. Penilaian DDA terbaik juga diharapkan dapat memacu kinerja BPS daerah untuk dapat lebih meningkatkan kualitas baik dari sisi tampilan maupun dari kelengkapan dan konsistensi data.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas dan layanan publikasi, memberikan pelayanan kepada konsumen data (penyusunan berbagai publikasi, program

ARC, infografis, DDA yang semakin berkualitas, sosialisasi mengenai publikasi, supervisi kegiatan publikasi, dan BRS yang efektif), memberikan pelayanan internal kepada subject matter produsen publikasi (penomoran publikasi, pembuatan cover, sistem mailing list, SPRP, dan katalog), memberikan pelayanan internal kepada unit-unit kerja yang melakukan pelayanan langsung ke konsumen data dan meningkatkan kualitas publikasi DDA, serta implementasi Satu Data Indonesia dengan Simdasi.

Output dari peningkatan kualitas dan layanan publikasi ini adalah publikasi DDA Tahun 2021 dan Kumpulan Berita Resmi Statistik (BRS) Tahun 2021.

Sub Fungsi Jaringan Dan Rujukan Statistik

Pemutakhiran Sistem Dan Program MFD& MBS Berbasis Web

Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) yang mutakhir sangat diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei. Untuk mendapatkan informasi wilayah yang mutakhir, diperlukan sistem yang memudahkan untuk melakukan pemutakhiran ketika terjadi perubahan Wilayah Administrasi (WA) dan Blok Sensus (BS). Pemutakhiran WA dan BS dilakukan secara berkesinambungan.

Pemutakhiran MFD dan MBS dilakukan menggunakan Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web. Melalui sistem ini BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota secara langsung dapat merekam perubahan WA dan BS. Hasil pemutakhiran juga dapat dipantau dan dimanfaatkan langsung oleh seluruh jajaran BPS. Kegiatan pemutakhiran dan monitoring dapat dilakukan secara online, dimana data perubahan WA dan BS seluruh Indonesia dikumpulkan dalam satu basis data

yang disimpan di server BPS. Tujuan kegiatan Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan data wilayah administrasi (MFD) dan MBS di kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang mutakhir.
2. Mendapatkan informasi histori perubahan wilayah dari waktu ke waktu.
3. Mendapatkan informasi muatan dalam BS sesuai keadaan lapangan

Output dari pemutakhiran sistem dan program MFD dan MBS berbasis web ini adalah Publikasi Master File Desa Provinsi Sumatera Selatan 2021 dan Laporan Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS berbasis web Tahun 2021.



Cover Publikasi “Master File Desa Provinsi Sumatera Selatan 2021”

Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan Muatan Hasil SP2020

Kegiatan pendataan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) telah dilaksanakan. Data hasil pendataan lapangan SP2020 telah diolah dan dipublikasikan pada awal tahun 2021. Selain itu, kegiatan Pembentukan Blok Sensus tahun 2020 (BS2020) juga telah menghasilkan master dan peta digital BS2020 untuk seluruh wilayah Indonesia sebagai dasar pelaksanaan kegiatan statistik selama 10 tahun ke depan.

Kegiatan verifikasi lapangan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) menghasilkan

data kependudukan per SLS, dengan posisi bangunan berpenghuni yang digambarkan dengan titik, serta diberi nomor bangunan di peta SP2020-WS dan SP2020-DP. Titik dan nomor bangunan di peta SP2020-WS ini bermanfaat untuk kegiatan pendataan lapangan BPS selanjutnya, melengkapi informasi geospasial pada kerangka sampel BPS, serta Integrasi hasil SP2020 dengan peta BS2020 yang telah dibuat. Titik dan nomor bangunan yang telah digambarkan tersebut pada tahun 2021 diubah format ke digital

melalui kegiatan Digitalisasi Titik Bangunan Hasil SP2020.

Proses Digitalisasi Titik Bangunan Hasil SP2020 masuk dalam komponen kegiatan Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan Muatan Hasil SP2020. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Scan dan rename peta SP2020-WS;
2. Georeference hasil scan peta SP2020-WS;
3. Digitasi titik bangunan dan pengisian atribut nomor bangunan;

4. Perbaiki batas SLS hasil SP2020;
5. Penambahan identitas BS2020 ke dalam peta titik bangunan;
6. Layouting peta.

Output dari Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan Muatan Hasil SP2020 adalah hasil scan peta SP2020-WS yang sudah bergeoreference, peta digital titik bangunan yang sudah dilengkapi atribut BS dan SLS, peta digital SLS hasil perbaikan, dan layout peta yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan survei lapangan BPS.



Output peta WB-2020 dengan titik bangunan

Sub Fungsi Integrasi Pengolahan Data

Pengolahan Data Sensus/Survei

Seksi Integrasi Pengolahan Data (IPD) pada dasarnya memadukan berbagai kegiatan pengolahan data statistik baik dengan pendekatan database management system maupun melalui aplikasi pengolahan sehingga dapat diperoleh data statistik yang terintegrasi. Seksi IPD berfungsi sebagai supporting system pengolahan data dalam setiap sensus/survei.

Pada tahun 2021 kegiatan pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengolahan data SP2020 September C1

2. Kegiatan pengolahan data survei diantaranya Susenas, Sakernas, VIMK, Wisnus, SimTP, dll.

Selain melakukan kegiatan pengolahan data, seksi IPD juga melakukan layanan pengembangan aplikasi pengolahan data survei. Beberapa aplikasi yang dikembangkan antara lain aplikasi SWAMI, IMK Triwulanan, VHTS, SIMKET.

Output dari kegiatan pengolahan data sensus/survei adalah raw data yang sudah clean dan tervalidasi serta terpenuhinya permintaan kebutuhan aplikasi oleh *subject matter*.

INOVASI 2016 - 2021

- Dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), telah dikembangkan aplikasi Si Data Eksotiss, yang dapat diunduh melalui Google Playstore secara gratis. Pengguna data dapat dengan mudah mengakses data statistik hanya dalam satu genggam. Si Data Eksotiss diharapkan mampu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap akses data BPS.
- Penambahan fitur “Chat Us” pada website sumsel.bps.go.id. Fitur ini memungkinkan pengunjung website melakukan chatting (obrolan) langsung dengan admin website. Pengunjung bisa berinteraksi langsung jika mengalami kendala tentang data atau segala hal yang berkaitan dengan BPS.
- Pembentukan Tim Lapak Statistik yang bertugas untuk mempermudah pengguna data dalam memperoleh layanan : data pustaka tercetak dan digital, pembelian publikasi dalam bentuk softcopy dan harcopy, data mikro, serta konsultasi statistik sampai dengan rekomendasi/bantuan survei.

PENINGKATAN
KUALITAS DAN
LAYANAN
PUBLIKASI

KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
<p>PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR SEKTORAL DAN KHUSUS</p>	<p>Kekurangan SDM sehingga menghambat proses pendataan metadata; kesibukan responden yang menangani teknis kegiatan sehingga wawancara sering tertunda</p>	<p>Melibatkan SDM dari seksi JRS dan IPD, serta mengintegrasikan kegiatan metadata dengan pengumpulan data dari instansi untuk penyusunan publikasi; Membangun komunikasi yang baik responden sehingga Ybs bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara</p>
<p>PEMBENTUKAN BS2020</p>	<p>1. Waktu pelaksanaan dirasa kurang sesuai, karena berbarengan dengan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) 2. Pelatihan dengan mekanisme jarak jauh dirasa tidak efektif</p>	<p>1. Secara rutin melakukan monitoring progres capaian kabupaten/kota melalui WAG kasi IPDS 2. Membuat wadah tanya jawab seputar Pembentukan BS2020 berupa google sheet (link: https://s.bps.go.id/sumseltanyaBS2020) yang bisa diakses oleh semua orang</p>
<p>PEMUTAKHIRAN SISTEM DAN PROGRAM MFD & MBS BERBASIS WEB</p>	<p>1. SK pemekaran wilayah administrasi beberapa kabupaten/kota kebanyakan merupakan SK Bupati</p>	<p>1. Pendampingan dan pengarahan kepada BPS Kabupaten/Kota terutamanya seksi IPDS dan KSK dan koordinasi yang baik dengan Pemda dalam hal perubahan wilayah administrasi</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>atau Walikota. Hal ini menyebabkan masih ada peluang pemekaran wilayah tersebut ditolak oleh pusat sehingga wilayah hasil pemekaran harus dikembalikan ke wilayah awal</p> <p>2. Adanya pemekaran wilayah desa berupa “Desa Persiapan” dengan berdasar SK Bupati/Walikota. Desa tersebut telah beroperasi resmi berikut dengan perangkat (aparatus) desa yang juga telah resmi dilantik</p>	<p>2. “Desa Persiapan” tetap dicatat dan dilaporkan di sistem MFD online; Jika di masa mendatang terdapat perubahan status, baik itu menjadi “Desa atau batal menjadi “Desa”, maka status desa tersebut di MFD online juga harus diupdate</p>

FUNGSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK



Sub Fungsi Neraca Produksi

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010:100

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator ekonomi yang selama ini telah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, data PDRB secara periodik harus disusun dan selalu ditingkatkan kualitasnya, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data adalah dengan merekonsiliasi data-data tersebut, mengingat penyusunan PDRB menggunakan berbagai sumber data baik primer maupun sekunder.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk menyediakan data PDRB provinsi dan PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha yang berkualitas; menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan metodologi dari data yang digunakan dalam penyusunan PDRB menurut lapangan usaha baik tahunan maupun triwulanan; meningkatkan mutu data PDRB provinsi menurut lapangan usaha dengan hasil studi perbandingan antar sektor

dalam kabupaten dan atau dalam provinsi, antar kabupaten/kota di tiap provinsi dan antar provinsi se-Indonesia dengan nasional; menyempurnakan dan mengevaluasi lembar kerja penyusunan PDRB dan survei-survei khususnya; meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan usaha antara PDRB dengan PDB; menyusun dan menyajikan PDRB provinsi-provinsi tahunan dan triwulanan dan PDRB kabupaten/kota tahunan di Indonesia menurut lapangan usaha; serta selalu melakukan kaderisasi sehingga output di atas bisa diandalkan.

Menyikapi situasi perkembangan wabah Covid19, mulai tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian proses bisnis pelaksanaan survei-survei neraca produksi. Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP), Survei Khusus Pariwisata Berkelanjutan Industri Pariwisata (SKPB), Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ) dan Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP) tahun anggaran 2020 berintegrasi menjadi

Survei Neraca Terintegrasi (SINASI) dan pelaksanaannya menggunakan Metode Kombinasi yaitu melalui wawancara tatap muka dan wawancara jarak jauh melalui telepon, email, atau media komunikasi lainnya.

Tahun 2021, dimana SINASI terdiri dari Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP), Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ) dan Indepth SEEA masih menggunakan metode Kombinasi seperti tahun 2020. SKTNP Barang dan Jasa periode anggaran tahun 2021 juga dilaksanakan sesuai dengan metode kombinasi sesuai metode pencacahan tahap IV tahun 2020.

Output yang dihasilkan dalam Penyusunan PDRB menurut Lapangan Usaha Triwulanan adalah angka Pertumbuhan Ekonomi yang dirilis setiap triwulanan dalam bentuk Berita Resmi Statistik. Rilis angka Pertumbuhan Ekonomi ini sangat dinanti oleh semua pihak

baik dari dinas/instansi pemerintah, perusahaan swasta dan kalangan akademisi. Angka Pertumbuhan Ekonomi ini sangat berguna untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan secara sektoral, melihat tingkat kemakmuran masyarakat melalui angka pendapatan per kapita, serta digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan baik sektoral maupun regional. Output lainnya yaitu berupa Laporan Penyusunan PDRB Tahunan & Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010:100; Publikasi PDRB Provinsi Sumatera Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, Sosialisasi Tabel Input Output Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dalam bentuk Webinar yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik itu jajaran Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Praktisi Ekonomi, Asosiasi Dagang, dsb-nya di Provinsi Sumatera Selatan.



Sosialisasi Tabel Input Output 2016



Sosialisasi Tabel input Output 2016

Sosialisasi Tabel Input Output Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Sub Fungsi Neraca Pengeluaran

Penyusunan PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

Untuk mendapatkan penghitungan angka PDRB Pengeluaran yang akurat diperlukan data indikator yang tepat. Saat ini data yang dikumpulkan oleh fungsi selain fungsi NAWAS masih belum cukup untuk digunakan sebagai indikator dalam menghitung PDRB Pengeluaran. Oleh karena itu, Kedeputian Neraca Pengeluaran di BPS RI merancang survei-survei khusus Neraca Pengeluaran, baik yang dilakukan secara triwulanan maupun tahunan untuk mendapatkan indikator yang tepat guna menghitung angka PDRB Pengeluaran.

Pada tahun 2021, survei khusus Neraca Pengeluaran Triwulanan yang dilakukan antara lain Survei Khusus Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (SKLNPR) dan Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT). Selain itu, juga terdapat survei khusus Neraca Pengeluaran Tahunan yang meliputi Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP) Tahunan, Updating Direktori, Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP), Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS), Survei Matriks

Arus Komoditas (SMAK), Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI), dan Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

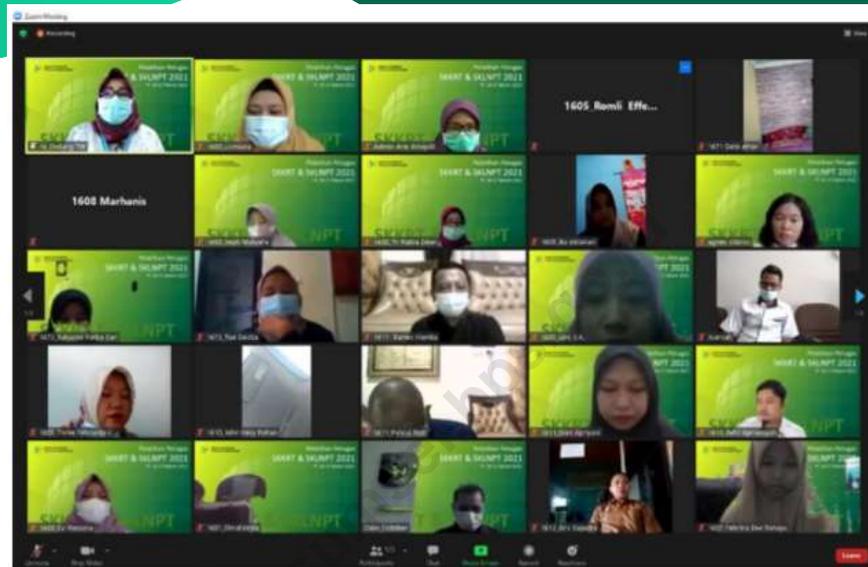
Penyusunan PDRB Pengeluaran sebagai salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, selain dihitung pada level provinsi juga dihitung pada level kabupaten.

Pada hakikatnya, akumulasi nilai PDRB seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan adalah nilai PDRB provinsi. Kemudian nilai pertumbuhan ekonomi yang diturunkan dari nilai PDRB Provinsi adalah resultante dari nilai pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten. Karena masing-masing nilai PDRB tersebut dihitung secara independen pada level provinsi dan kabupaten, maka terjadi selisih jumlah nilai seluruh kabupaten bila dibandingkan dengan nilai PDRB provinsi. Untuk mengatasi selisih yang terjadi antara nilai hasil penghitungan kabupaten dan nilai hasil penghitungan pada level provinsi, maka

sebelum angka PDRB dirilis dilaksanakanlah Konsultasi Serentak Daerah (Konserda).

Output dari kegiatan ini adalah angka Pertumbuhan Ekonomii yang dirilis setiap

triwulanan dalam bentuk Berita Resmi Statistik, Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 dan Laporan Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan.



Pelatihan SKLNPR dan SKKRT secara online

Sub Fungsi Analisis Lintas Sektor

Penyusunan Publikasi

Sub fungsi Analisis Statistik Lintas Sektor pada tahun 2021 menyusun 9 (sembilan) publikasi dengan rincian 2 (dua) publikasi

termasuk publikasi ARC dan 7 (tujuh) publikasi Non ARC. Judul publikasi tersebut terdapat pada tabel berikut :

Daftar Nama Publikasi SKF Analisis Lintas Sektor

No	Judul Publikasi	ARC/Non ARC	Tanggal Rilis
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Statistik Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2021	ARC	27 September 2021
2	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan 2021	ARC	30 November 2021
3	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan 2020	Non ARC	Januari 2021
4	Perkembangan Beberapa Indikator Strategis Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Semester II 2020	Non ARC	Februari 2021
5	Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan 2020	Non ARC	Juni 2021
6	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan 2020	Non ARC	Juli 2021
7	Perkembangan Beberapa Indikator Strategis Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Semester I 2021	Non ARC	Oktober 2021
8	Analisis Isu Terkini Provinsi Sumatera Selatan 2020	Non ARC	November 2021
9	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sumatera Selatan 2020	Non ARC	November 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang telah dihitung oleh BPS. Indeks ini mencakup umur harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator umur harapan hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan Output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu menyajikan angka IPM tahun 2021 pada level kabupaten/kota dan provinsi. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta

Capacity Building Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)

Sebelum dilaksanakan kegiatan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), dilakukan kegiatan capacity building Inkesra dengan mengundang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ibu Vanda Ningrum, SE, M.GM. Dengan adanya kegiatan capacity building ini diharapkan dapat

pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Terlebih lagi pengukuran IPM dilakukan untuk kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Output kegiatan ini adalah rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

meningkatkan pemahaman mengenai indikator kesejahteraan rakyat.

Kegiatan capacity building Inkesra dilaksanakan melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan 8 September 2021. Peserta adalah fungsional statistisi BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.



Flyer Undangan Capacity Building Inkesra

<https://sumsel.bps.go.id>

INOVASI 2016 - 2021

- For Tekwan merupakan suatu kegiatan dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektoral Triwulanan yang dilakukan sebelum release. Keempatannya berupa diskusi melibatkan stakeholder internal maupun eksternal melalui forum diskusi berbasis online.

PENYUSUNAN
PDRB
SEKTORAL
TRIWULANAN

- Ngopi Cantik (Ngobrol Pintar Cara Instan Statistik) sebagai wadah tukar pikiran mengenai fenomena yang terjadi seputar kondisi perekonomian dan sosial masyarakat untuk mendukung pengetahuan dan memahami perkembangan dan isu terkini.

PENGHITUNGAN
PDRB DAN
ANALISIS DATA
STATISTIK

- Goresan Pena Wong Kito (Web Menulis BPS Provinsi Sumsel) merupakan website yang dibuat untuk menampung tulisan pegawai BPS se-Sumsel yang dimuat di media cetak dan elektronik. Laman tulisan pegawai

PENGHITUNGAN
PDRB DAN
ANALISIS DATA
STATISTIK

KENDALA DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
<p>PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010:100</p>	<p>1. Masih ada kabupaten/kota yang menyelesaikan survei melewati jadwal, untuk SINASI (SKNP dan SKSJ) disebabkan karena petugas lapangan kurang dapat mematuhi jadwal sehingga . Hal ini disebabkan karena ada kegiatan besar yang memerlukan prioritas yaitu SITASI 2021. Keterbatasan waktu dan kondisi pandemi COVID-19 yang menerapkan PPKM, sehingga cukup sulit untuk menembus perusahaan-perusahaan besar.</p> <p>2. Untuk SINASI (SKNP dan SKSJ), permasalahan yang ditemui masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu jawaban yang belum terisi lengkap dan konsistensi</p>	<p>1. Dengan adanya SIMKET untuk memonitoring realisasi pencacahan sudah cukup baik dan meningkatkan ketepatan waktu pengumpulan data. Namun tetap perlu terus diingatkan.</p> <p>2. Untuk SINASI (SKNP dan SKSJ), perlu dilakukan pelatihan yang lebih bersifat praktek, sehingga seluruh Kasi/KF NWAS di Kabupaten/Kota ataupun staf yang menangani SINASI dapat lebih menguasai pencatatan akuntansi untuk survei ini. Mengingat SINASI merupakan survei yang paling kompleks di Neraca Produksi.</p> <p>3. BPS Provinsi membantu menyediakan beberapa data</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>jawaban. Permasalahan yang terjadi di Survei SKNP adalah Isian di kuesionernya banyak yang kosong. Hal ini karena survei ini sangat kompleks isian, rinciannya sangat detail mengenai pendapatan dan pengeluaran. Petugas kurang mendalami konsep definisi sehingga masih banyak isian yang tidak konsisten.</p> <p>3. Permasalahan pada konserda masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu perbedaan sumber data yang digunakan Kab/Kota dan Provinsi untuk menghitung PDRB dan tidak semua Kab/Kota memiliki data yang dibutuhkan (keterbatasan data). Untuk data yang tidak tersedia, Kab/Kota juga cenderung tidak memiliki dasar</p>	<p>yang sekiranya dapat membantu BPS Kab/Kota untuk melakukan penghitungan dan mengakomodir data yang sumbernya lebih kuat. Disamping itu Kabupaten/Kota perlu untuk mengumpulkan data dan fenomena segera untuk penghitungan PDRB. Diharapkan proses rekonsiliasi lebih dapat berjalan dengan lancar karena bersumber dari data dan fenomena yang sesuai.</p> <p>4. Dalam rangka meningkatkan daya serap di Neraca Produksi, ada baiknya untuk kabupaten/kota dibuat timetable yang lebih jelas terkait pengumpulan dokumen administratif untuk pencairan dana. Selain itu, supervisi BPS</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>fenomena yang sesuai. Hal ini menyebabkan proses rekonsiliasi berjalan cukup alot. Proses finalisasi rekonsiliasi juga tidak dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan rekonsiliasi by email.</p> <p>4. Keterlambatan dalam pengumpulan visum perjalanan dan laporan perjalanan dinas (LPD), sehingga menyebabkan daya serap di seksi/ sub fungsi Neraca Produksi masih cukup rendah/tidak sesuai harapan atau tidak sesuai dengan matriks rencana penarikan dana (RPD).</p> <p>5. Pemahaman tentang konsep SNA (System of National Account) perlu untuk terus dibina, terutama untuk Kasi/KF NWAS Kab/kota yang baru seperti Kasi/KF NWAS di</p>	<p>Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan administrasi juga telah dilakukan supaya BPS Kab/kota terbantu.</p> <p>5. Perlu adanya pembinaan untuk meningkatkan pemahaman terkait SNA, terutama dari BPS RI. Selain itu Kasi/KF NWAS dan seluruh staf Neraca Produksi juga diharapkan dapat mengikuti pelatihan maupun pembinaan secara lebih seksama.</p> <p>6. Penyusunan Lembar Kerja (LK) dapat dilakukan dengan mengagendakan pertemuan yang dapat dilakukan dengan mengupayakan revisi POK di kabupaten/kota namun karena masa pandemi ini perlu untuk mengoptimalkan fungsi dari WAG (Whatsapp Group) dan</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>Kabupaten Lahat. Kabupaten OKUS, Kabupaten OKUT dan Kota Lubuk Linggau.</p> <p>6. Pengisian Lembar Kerja (LK) untuk penghitungan PDRB Kabupaten/Kota juga masih mengalami banyak kendala, terkait data, metode, indikator yang dapat digunakan dan sebagainya.</p>	<p>Zoom Meeting untuk terus melakukan sharing knowledge terkait pemahaman neraca dan survei-survei yang ada.</p>
<p>PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN</p>	<p>1. Responden SKKRT dan SKLNPRRT bersifat panel selama 4 triwulan berturut-turut. Karena bersifat panel maka ada beberapa responden yang bosan untuk didata, sehingga saat didata mereka kurang merespon dengan baik.</p> <p>2. Tidak banyak dinas sebagai target sampel Updating Direktori LNP di Sumatera Selatan, baik di level provinsi maupun kabupaten yang memiliki list daftar data</p>	<p>1. Mengingat secara kontinu jadwal pencacahan SMAK</p> <p>2. Terus mencari informasi lembaga-lembaga non profit yang memiliki potensi memenuhi syarat sebagai sampel Updating Direktori LNP.</p> <p>3. Pencacahan dilakukan di sekitar bulan Mei. Namun sebelumnya sudah mencari info kapan data yang sudah diaudit bisa diperoleh. Data dalam bentuk hardcopy</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	<p>lembaga non profit dan meskipun memiliki, namun data yang tersedia kurang lengkap sesuai rincian yang diperlukan.</p> <p>3. Pada pelaksanaan SKSIP ditemui kendala data hasil audit baru tersedia bulan Mei dan tidak semua dinas bersedia memberikan data realisasi anggaran yang sangat rinci dalam bentuk file excel.</p> <p>4. Pelaksanaan Survei PMTB ditemui kendala : Perusahaan tidak memiliki catatan keuangan sehingga isian nilai produksi, nilai asset neto dan nilai persediaan kurang akurat. Responden tidak bisa memperkirakan harga penambahan barang modal karena barang modal merupakan pemberian atau</p>	<p>kemudian dientri ulang dan dilanjutkan dengan proses mapping sesuai dengan format kuesioner.</p> <p>4. Dilakukan probing lebih mendalam dan diisi sesuai dengan pengakuan responden. Melakukan estimasi harga atas barang modal tersebut dengan memperhatikan jenis dan tahun pembuatan barang modal. Menjelaskan ke responden bahwa semua data responden tidak akan dipublish ke umum dan tidak ada sangkut pautnya dengan perpajakan.</p>

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
	hibah. Beberapa perusahaan tidak mau memberikan data karena menganggap ada hubungannya dengan perpajakan.	
PENYUSUNAN PUBLIKASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyusunan BRS IPM 2020 tahun ini di tengah pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan rekonsiliasi tatap muka. 2. Data yang seharusnya dimuat belum tersedia/ belum rilis sehingga belum dapat dilakukan analisis serta tumpang tindih pekerjaan. 3. Kendala mendapatkan jumlah responden yang bersedia berpartisipasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun BRS, infografis dan bahan paparan IPM telah menyusun template bahan rilis data sehingga memudahkan pekerjaan dan BRS bisa langsung diselesaikan saat angka IPM final dikirim dari BPS RI. 2. Menyusun template terlebih dahulu; Berkomunikasi intensif dengan subject matter penghasil data; dan Menyusun monitoring progress penyelesaian publikasi. 3. Setiap pegawai berpartisipasi aktif untuk melakukan pendataan

Aktivitas	Kendala	Rekomendasi Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
		dalam rangka menambah jumlah responden.

<https://sumsel.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1131, Palembang 30129

Telephone: (0711) 353174 Fax: (0711) 353174

Website: sumsel.bps.go.id Email: bps1600@bps.go.id